IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH STUDI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN SAMPAH

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Moch Chikhal Firdaus
NIM: 212102030030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH STUDI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN SAMPAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar sarjana (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Moch Chikhal Firdaus
NIM : 212102030030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
OKTOBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH STUDI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN SAMPAH

SKRIPSI

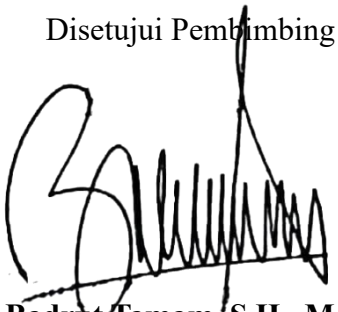
diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar sarjana (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Moch. Chikhal Firdaus
NIM: 212102030030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH STUDI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN SAMPAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 05 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Achmad Hasan Basri, M.H.	**Dwi Hastuti, M.P.A.**
NIP. 198804132019031008	**NIP. 198705082019032008**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Anggota

1. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. ( )
2. Badrut Tamam, S.H., M.H. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197211072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمۡ خَلَٰٓئِفَ ٱلۡأَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: "Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan dia meninggalkan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-nya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu sangat cepat hukuman-nya. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S: Al-An'am:165)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama Republik Indonesia*, Alquran Tajwid dan Terjemah*, (Denpasar: Qur'an Tajuwid, 2007), 150

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan kasih sayang, rahmat, taufiq, dan hidayah-nya skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sampah"**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, baik moril maupun materil, serta berbagai kritik dan saran yang diberikan selama proses penyusunan. Oleh karena itu, karya ilmiah yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Karya sederhana penulis persembahkan kepada almarhum Bapak tercinta, Bapak Misnawan, yang semasa hidupnya penuh kasih dan doa, dan teladan yang menjadi penerang langkah penulis. Serta kepada Ibunda tercinta Ibu Hotimah yang senantiasa berkorban, dan membimbing hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kakak saya, Sofyan Hidayat, yang selalu memberi arahan serta membantu menasehati penulis selama menempuh perkuliahan. Kakak saya, Dimas Primayuda, yang senantiasa menyertai dengan doa dari rumah.
3. Kepada Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. yakni sebagai Dosen Pembimbing skripsi.
4. Kepada yang Terhormat Seluruh Dosen Fakultas Syariah.
5. Kepada sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu Yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan ruang diskusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan Allah SWT, tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, yang di akhir kelak memberikan syafaat kepada para pengikutnya.

Terselesaikannya penelitian ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, serta nasihat yang penuh makna dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
3. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H selaku dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, ilmu, serta kesabaran yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah membantu kelancaran urusan administrasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua Narasumber yang saya gunakan dalam kegiatan penggalian data melalui wawancara untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
8. Semua Penulis/Pengarang Buku, Jurnal, Website, dan Referensi lainnya yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
9. *Real Madrid Club de Futbol*, klub yang tidak sekedar Penulis kagumi, tetapi telah menjadi bagian kecil dari perjalanan Penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Real Madrid selalu mengingatkan Penulis bahwa sebuah perjuangan tidak pernah benar-benar selesai sebelum peluit terakhir dibunyikan. Semangat untuk terus berjuang, bangkkit dari keterpurukan, percaya pada proses, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi keadaan menjadi nilai yang Penulis temukan dari klub yang dicintai ini. ***!Hala Madrid y nada mas!***

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Oktober 2026

Moch Chikhal Firdaus
NIM. 212102030030

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Moch Chikhal Firdaus, 2026: *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sampah.*

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah, TPA Pakusari.

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi isu lingkungan yang krusial di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Jember. Volume sampah yang meningkat setiap tahun tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai, sehingga menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah memberikan dasar hukum mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk upaya pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

Fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Jember Nomor 2 Tahun 2023; serta (2) bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bedasarkan Perda No. 2 Tahun 2023 terkait pemanfaatan sampah. Penelitian ini juga mengidentifikasi (3) bagaimana fungsi Pemerinntah Daerah dalam menghadapi permasalahan sampah terkait tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023.

Tujuan penelitian ini adalah: menganalisis implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023; (2) menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan sampah; dan (3) menganalisis fungsi Pemerintah Daerah dalam menghadapi permasalahan sampah berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023..

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, serta pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolaan sampah, koordinasi antarpihak, serta partisipasi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAS JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Jenis Penelitian..... 41

B. Pendekatan Penelitian 42

C. Lokasi Penelitian..... 43

D. Subyek Penelitian..... 44

E. Sumber Data..... 45

F. Teknik Pengumpulan Data 46

G. Analisis Data 47

H. Keabsahan Data..... 49

I. Tahapan Penelitian 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 52

B. Penyajian Data dan Analisis..... 62

C. Pembahasan Temuan..... 83

BAB V PENUTUP..... 97

A. Kesimpulan 97

B. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA..... 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No. Uraian **Hal.**

2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian 16

4.1 Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024..... 72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian Hal.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember 54

Gambar 4.2 Struktur Organisasi TPA Pakusari Kabupaten Jember 55

Gambar 4.3 Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Jember..... 64

Gambar 4.4 Dokumen Lapangan Gunungan Sampah Overload Kapasitas 72

Gambar 4.5 Foto Alat Berat Rusak 70

Gambar 46 Foto Tempat Budidaya Maggot dan Kompos..... 74

Gambar 4.7 Foto Aktivitas Masyarakat Membuang Sampah tanpa dipilah 78

Gambar 4.8 Dokumentasi Foto Sungai Tercemar 79

Gambar 4.9 Foto Wilayah Pelayanan TPA se-Jember..... 80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan sampah merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab Pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,[2] yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat konstitusi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah, tetapi juga mencakup upaya pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketentuan mengenai pengelolaan sampah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan.[3] Selain itu, pembagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah juga berkaitan dengan Undang-

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang persampahan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.[4]

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah membagi tanggung jawab pemerintah daerah dalam dua lapis. Pasal 5 mengatur tugas yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat, memfasiltasi penyediaan sarana dan prasarana, serta mendorong pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.

Pasal 6 mengatur wewenang, yaitu menetapkan kebijakan dan staregi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah, melakukan pembinaan dan pengawasann serta menetapkan lokasi TPA. Dengan demikian, pemanfaatan sampah bukan sekedar pilihan, tetapi bagian dari tugas yang wajib dijalankan Pemerintah Daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 12 menjabarkan tugas tersebut secara lebih konkret. Pegurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan, pendaur ulang, dan pemanfaatan kembali. Peran Pemerintah Daerah di sini bersifat fasilitatif, yaitu menetapkan target pengurangan, menyediakan teknologi ramah lingkungan, menyediakan teknologi ramah lingkungan, serta memfasilitasi pemasaran produk daur ulang. Pasal yang sama juga membebankan kewajiban kepada pelaku usaha dan masyarakat. Artinya, keberhasilan pemanfaaatan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada partisipasi pihak. [5]

[4] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

[5] Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5, 6, 12.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persoalan sampah pada tingkat global telah menjadi isu di bidang lingkungan sangat penting untuk diberikan perhatian serius dari masyarakat internasional. Di Amerika Latin dan Karibia misalnya, sekitar 145.500 ton sampah sepertiga dari semua limbah perkotaan berakhir di tempat pembuangan sampah setiap hari. Seiring dengan peningkatan konsumsi serta pola hidup sekarang, berdampak terjadinya peningkatan yang signifikan dalam produksi sampah.[6] Peningkatan tersebut tak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, termasuk di Asia dan Afrika. Dalam skala global dari pembangkitan limbah padat telah mencapai proporsi yang mengejutkan. Dunia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah padat setiap tahun yang diprediksi akan melonjak drastis pada 2050, disebut oleh program lingkungan hidup PBB.[7]

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Juli 2024 tercatat bahwa 290 kabupaten/kota di Indonesia menyumbang timbunan sampah nasional sebanyak 31,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 63,3% atau setara 20,5 juta ton berhasil dikelola, sementara 35,56% atau sekitar 11,3 juta ton lainnya belum tertangani.[8]

Sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagai solusi, yang sering kali hanya untuk penumpukan sampah. Menurut data terbaru ada sekitar 271 TPA yang tersebar

---

[6] Nuru Lama. "Dunia Punya Masalah Sampah," *Global IFC*. April 26, 2024, https://www.ifc.org/en/blogs/2024/the-world-has-a-waste-problem

[7] Gusti Ngurah Hendra Fajariyadi, "implementasi peraturan daerah kabupaten jember no 2 th 2023 tentang pengelolaan sampah," *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, no. 1 (juni 2024): 240, https://journal.unej.ac.id/KONAMI/article/view/1016/655

[8] "Humas BRIN," 11,3 Juta Ton Sampah Di Indonesia Tidak Terkelola Dengan Baik, Google, BRIN Juli 26 2024 , https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di 33 provinsi di Indonesia. Dan diketahui mayoritas TPA itu telah mendekati kapasitas maksimalnya, hanya ada sekitar 10% dari TPA yang menerapkan metode *sanitary landfill*, metode ini ialah sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang sampah ke lokasi cekung, dipadati, dan menimbunnya dengan tanah. Sementara sisanya menggunakan metode yang kurang ramah lingkungan seperti *open dumping*. Metode ini adalah pembuangan sampah secara terbuka tanpa penutupan atau timbunan, kurang disarankan karena dapat membahayakan lingkungan.[9]

Masyarakat daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, volume sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 1.700 ton per hari, terdiri dari jenis sampah organik dan non-organik. Namun, kapasitas pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah hanya 350 ton per hari. Artinya, sekitar 79,41% dari total sampah harian belum tertangani secara optimal.[10] Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kapasitas tempat pemrosesan akhir, tetapi juga dengan jangkauan pelayanan pengangkutan dan kemampuan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Ketimpangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dan kapasitas pengelolaannya di Jember menyebabkan sebagian besar sampah dibuang sembarangan di sungai, lahan kosong, dan lingkungan terbuka lainnya, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan serta risiko kesehatan bagi

[9] Sarwo Edy, "darurat sampah di Indonesia" 30 Januari 2025, https://www.g-news.id/opini/158915422/darurat-sampah-di-indonesia-tantangan-dan-solusi-menuju-pengelolaan-yang-berkelanjutan

[10] "Warga Jember Hasilkan Ribuan Ton Sampah Per Hari Tapi Tak Bisa Kelola, ini akibatnya, *Merdeka.com,* Desember 15, 2022, https://www.merdeka.com/jatim/warga-jember-hasilkan-ribuan-ton-sampah-per-hari-tapi-tak-bisa-kelola-ini-akibatnya.html?page=3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan dana, minimnya sarana pengelolaan sampah yang memadai, serta rendahnya tingkat masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah secara mandiri.[11]

Perda Kabupaten Jember No. 2 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah, Regulasi utama pada tingkat kabupaten yang mengatur sistem pengelolaan sampah di Jember. mengatur tugas dan wewenang pemerintahan dalam pengelolaan sampah, strategi daerah, sistem pengurangan dan penanganan sampah, serta larangan dan sanksi. Pasal 22 mewajibkan penggunaan metode *Sanitary Landfill* dalam pengelolaan TPA.[12] kondisi pengelolaan sampah di lapangan masih didominasi oleh penumpukan sampah dan menunjukkan karakteristik *Open Dumping*. Dalam sistem *Open Dumping*, sampah dibuang dan ditumpuk tanpa pengendalian yang memadai sebagaimana dipersyaratkan dalam sistem sanitary landfill. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan lahan dan adanya alat berat yang rusak atau tidak berfungsi secara optimal. Akibatnya, proses penataan dan pengolahan sampah menjadi terkendala, sedangkan volume sampah yang masuk setiap hari terus menambah beban timbunan di TPA.

TPA Pakusari yang ada di Kabupaten Jember menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat Jember. Diperkirakan total ada 7,1 juta ton sampah di sana. Kelebihan kapasitas sudah menjadi masalah utama dalam

[11] " Dody Bayu Prasetyo," Jember Hasilkan 800 ton sampah per hari, hanya 180 ton yang masuk TPA, TIMES INDONESIA, Juni 05, 2021, https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/351045/jember-hasilkan-800-ton-sampah-per-hari-hanya-180-ton-yang-masuk-tpa

[12] Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beberapa tahun belakangan ini. Namun, sampai sekarang setelah adanya Perda sampah Jember tentang pengelolaan sampah, serta salah satu isi dari pasalnya yakni pemanfaatan sampah belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi *overload* yang terjadi, di sana juga rawan terjadi longsor akibat ketinggian gunung sampah yang kurang lebih 25 meter. Dari 2,6 juta jiwa warga Jember, masih banyak sekali yang membuang sampah sembarangan.[13]

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 mengatur bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan penanganan sampah, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memiliki orientasi yang lebih luas daripada sekadar memindahkan sampah dari sumber menuju tempat pemrosesan akhir. Sampah seharusnya dapat dikurangi, diolah, digunakan kembali, dan dimanfaatkan sehingga memiliki nilai lingkungan maupun ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris tersebut menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Penelitian tidak hanya melihat apakah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 telah ada dan dilaksanakan, tetapi juga menganalisis bagaimana kewenangan tersebut diterapkan dalam pemanfaatan sampah, faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah

[13] "Radar Digital: Overload,"TPA Pakusari Jember terima 200 ton per hari, ketinggian gunungan sampah mencapai 25 meter," 9 November 2023, https://radarjember.jawapos.com/jember/793263555/overload-tpa-pakusari-jember-terima-200-ton-per-hariketinggian-gunungan-sampah-capai-25-meter

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Daerah, serta bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam menghadapi persoalan pengelolaan sampah.

Tujuan pengelolaan sampah sebagaimana diarahkan oleh keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilihat tidak hanya dari aspek pembentukan norma hukum, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan praktik pengelolaan sampah di lapangan. Kesenjangan antara ketentuan yang berlaku dan kondisi empiris tersebut menjadi salah satu alasan penulis tertarik untuk meneliti implementasi peraturan daerah, khususnya mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pemanfaatan sampah di TPA Pakusari, Kabupaten Jember..

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sampah)".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah terkait pemanfaatan sampah?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Bagaimana fungsi Pemerintah Daerah dalam menghadapi permasalahan sampah terkait tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari peneliti sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah terkait pemanfaatan sampah.
3. Menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam menghadapi permasalahan sampah terkait tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoretis

   Penelitian ini dapat diharapkan untuk mengetahui tugas dan wewenang pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan yang telah di buat pemerintahan pusat maupun daerah.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi peneliti

      Peneliti dapat menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah berjalan sesuai dengan kebijakan yang dibuat dengan di tinjau

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari tugas dan wewenang dengan titik fokus permasalahan mengenai pemanfaatan yang sudah di atur di peraturan daerah.

b. Bagi masyarakat

Adannya penelitian ini berharap bagi masyarakat pengelolaan sampah bisa lebih terarah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.

c. Bagi instansi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi di perpustakaan, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang ingin mempelajari atau melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Daerah. Memperluas bacaan koleksi perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan bisa menjadi bahan kajian untuk Civitas Akademika.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yakni berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul. Bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[14] Tujuannya adalah memberikan kejelasan makna terhadap suatu kata dan konsep untuk menghindari kesalahan interpretasi. Serta menyediakan batasan operasional dalam ruang lingkup penelitian.

[14] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 13

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Implementasi

   Tindakan yang dilakukan oleh individu, organisasi, dan lembaga pemerintahan dalam menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan. [15]

2. Pengelolaan sampah

   Kegiatan yang sistematis menyeluruh, dan berkesinambungan. Mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.[16] Pengelolaan sampah mencakup serangkaian kegiatan seperti pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan akhir sampah, yang disertai dengan pengawasan serta pengaturan aspek hukum, administrasi, dan keuangan yang berkaitan.

3. Peraturan Daerah (Perda)

   Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayahnya. Salah satu jenis peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah.[17]

4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

   Tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman, sesuai standar lingkungan dan kesehatan. Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terdapat di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*. (Malang: Bayumedia Press, 2010), 88

[16] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pasal 1 ayat (3)

[17] Tim HukumOnline,"Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, Dan Aspek Pentingnya," *Hukumonline.com.* 12 juni 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wilayah Provinsi Jawa Timur. Jember berada di lereng pegunungan Argopuro yang membentang dari arah selatan sampai dengan Samudra Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember punya kedudukan dan peran yang sangat strategis sebagai suatu pusat kegiatan wilayah.[18]

5. Kewenangan

Wewenang yakni hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[19]

6. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian mengenai alur isi skripsi yang disusun mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Penjelasannya ditulis secara deskriptif dan naratif, seperti sebagai berikut:[21]

---

[18] Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, "Selayang Pandang," *Pemerintahan Kabupaten Jember*. https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/

[19] "Wewenang" 17 Oktober 2014, https://paralegal.id/pengertian/wewenang/

[20] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18

[21] Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* 93

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab I Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang yang mendasari dilaksanakannya penelitian, perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, manfaat yang diharapkan, serta gambaran sistematika penulisan.

Bab II Kajian kepustakaan berisi tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu serta landasan teori yang relevan, yang menjadi pijakan konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III Metode penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi tempat penelitian dilakukan, sumber data yang dimanfaatkan, teknik pengumpulan data, serta upaya untuk menjamin keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian menyajikan gambaran mengenai objek penelitian, pemaparan data yang diperoleh, analisis terhadap data tersebut, serta pembahasan yang menghubungkan temuan penelitian dengan teori dan rumusan masalah.

Bab V Penutup memuat simpulan yang ditarik dari hasil penelitian, serta saran-saran yang diajukan peneliti sebagai rekomendasi untuk penelitian berikutnya maupun bagi pihak-pihak terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, dengan membuat diringkas, baik penelitian yang sudah dipublikasikan (Skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya).[22] Penelitian terdahulu berperan sebagai dasar teori dan alat untuk membandingkan perkembangan penelitian yang ada. Dalam kajian hukum, studi-studi sebelumnya juga berguna untuk menilai apakah implementasi hukum yang ada sudah tepat atau memerlukan perubahan dan pembaruan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Saebu Tri Suryo (2021), yang berjudul, "Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekan Baru (Studi di Kecamatan Rumbai pesisir)". Skripsi ini menyoroti bagaimana pengelolaan sampah di kecamatan Rumbai Pesisir masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari minimnya infrastruktur, lemahnya penegakan hukum, hingga rendahnya kesadaran masyarakat.
2. Skripsi yang dibahas oleh Fitriani (2023), dengan judul, "Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Maros" Skripsi ini menyoroti bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Maros sudah berjalan, tetapi masih menghadapi kendala besar. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

[22] Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*. 39-40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Skripsi yang dikaji oleh Abdur Rahman (2022/2023), berjudul, ”Strategi pengelolaan sampah di pasar Kebon Roek Ampenan” dengan berfokus mengetahui strategi pengelolaan sampah di pasar kebon roek Ampenan dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Sampah di pasar Ampenan belum terkelola dengan baik karena minimnya fasilitas, rendahnya kesadaran pedagang, dan kurangnya kebijakan yang kuat dari pemerintah.
4. Skripsi yang dibahas oleh Thamara Putriani Br Matanari (2023), mengkaji tentang “Pengelolaan dan pengelolaan sampah rumah tangga dalam menunjang ekonomi masyarakat (Studi di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Banda Aceh” Skripsi ini mengkaji cara pengelolaan dan pengelolaan sampah dan mengidentifikasi dampak ekonomi dengan mengetahui tantangan dan hambatan. Dengan berfokus pengelolaan sampah di TPS-3R sudah berjalan sejak 2015, dampak ekonomi positif dari pengelolaan sampah, dan tantangan serta hambatan dalam pengelolaan sampah
5. Skripsi yang ditulis oleh Halilurrahman (2020) dengan judul, “Sistem pengelolaan sampah pasar Pagesangan Kota Mataram” Skripsi ini menunjukkan bahwa sampah di pasar pagesangan belum dikelola secara efektif karena minimnya fasilitas, minimnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Jika sebagian besar skripsi lain berfokus pada masalah pengelolaan sampah secara umum, seperti hambatan infrastruktur, kesadaran masyarakat, atau strategi penanganan di pasar dan permukiman, penelitian ini lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

spesifik menyoroti bagaimana regulasi daerah diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah di TPA Pakusari. Fokusnya tidak hanya pada kondisi pengelolaan sampah, tetapi juga pada evaluasi tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan Perda No. 2 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah. keunikan penelitian ini juga ada pada studi kasus pemanfaatan sampah di tingkat TPA, sesuatu yang belum banyak dikaji dalam penelitian lain. Sementara penelitian sebelumnya lebih banyak membahas strategi pengelolaan di pasar, peran pemerintah secara luas, atau dampak ekonomi dari pengelolaan sampah rumah tangga, Dengan demikian, penelitian ini memberikan nilai kebaruan penting dalam memahami bagaimana regulasi yang telah dibuat dapat berjalan di lapangan, tantangan yang dihadapi dalam Implementasinya, serta dampak yang dihasilkan bagi pengelolaan sampah di Jember. Untuk penelitian ini penulis mengangkat judul Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sampah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1.	Saebu Tri Suryo dengan judul. "Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekan Baru (Studi di Kecamatan	Sama-sama membahas pengelolaan sampah oleh pemerintahan daerah, terutama pada hambatan seperti sedikitnya infrastruktur dan rendahnya kesadaran masyarakat.	Skripsi ini lebih menyoroti hambatan pengelolaan sampah secara umum, seperti kendala umum pengelolaan sampah, bukan pada Implementasi kebijakan spesifik seperti perda dan tidak membahas bagaimana regulasi pemerintah diterapkan secara konkret	terletak pada fokus kajian terhadap tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pemanfaatan sampah di TPA Pakusari. Berbeda dengan penelitian Saebu Tri Suryo yang lebih menyoroti hambatan pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir, penelitian ini

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Novelty
	Rumbai pesisir).”			mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik, faktor pendukung dan penghambatnya, serta peran pemerintah daerah dalam menangani permasalahan pemanfaatan sampah.
2.	Fitriani dengan judul. “Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Maros”	Sama-sama menyoroti peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk regulasi, penyediaan sarana, serta pelibatan masyarakat	Skripsi yang diteliti oleh Fitriani meneliti peran pemerintah daerah secara luas tidak berfokus pada satu aspek pengelolaan sampah tetapi lebih menyeluruh dalam menganalisis peran pemerintah daerah dalam berbagai fungsi. Jadi tidak spesifik pada implementasi regulasi Perda.	analisis yang secara khusus menghubungkan tugas dan wewenang pemerintah daerah dengan implementasi Peraturan Sementara penelitian Fitriani membahas peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Maros secara umum, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan sampah di TPA Pakusari,
3.	Abdur Rahman berjudul, ,”Strategi Pengelolaan Sampah Di Pasar Kebon Roek Ampenan”	Kesamaan membahas strategi pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, termasuk kendala fasilitas dan sedikitnya kebijakan yang kuat	Fokus pada pasar dan strategi pengelolaan sampah di lingkungan pasar, tidak ada membahas tentang pemanfaatan sampah di TPA atau implementasi hukum yang terkait dengan pengelolaan sampah.	Penelitian Abdur Rahman berfokus pada strategi pengelolaan sampah di Pasar Kebon Roek Ampenan serta faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaannya. Adapun penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah terkait pemanfaatan sampah di TPA Pakusari.
4.	Thamara Putriani Br Matanari Dengan Judul, “Pengelolaan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Menunjang Ekonomi	Sama-sama membahas pemanfaatan sampah untuk kepentingan yang lebih produktif.	Fokusnya lebih ke ekonomi Sirkular dan pemanfaatan sampah di tingkat komunitas (TPS-3R). berbeda dengan penelitian yang akan diteliti akan membahas pemanfaatan sampah di tingkat TPA dengan basis	khususnya tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pemanfaatan sampah di TPA Pakusari. Berbeda dengan penelitian Thamara Putriani Br Matanari yang mengkaji pengelolaan sampah rumah tangga melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Novelty
	Masyarakat (Studi Di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Banda Aceh"		Implementasi regulasi	TPS-3R serta dampaknya terhadap ekonomi masyarakat di Gampong Lambung, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan regulasi,
5.	Halilurrahman dengan judul, "Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram"	Sama-sama meneliti sistem pengelolaan sampah di wilayah tertentu, serta menyoroti minimnya fasilitas dan lemahnya pengawasan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.	Penelitian ini lebih fokus pada sistem operasional pengelolaan sampah di pasar, bukan pada regulasi atau evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dalam pemanfaatan sampah di TPA.	terletak pada analisis implementasi kebijakan hukum daerah dalam pemanfaatan sampah. Penelitian Halilurrahman berfokus pada sistem pengelolaan sampah di Pasar Pagesangan, Kota Mataram, terutama terkait keterbatasan fasilitas, pengawasan, dan kesadaran masyarakat. Sementara itu, penelitian ini mengkaji tugas dan wewenang pemerintah daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Bagian ini memuat uraian mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam penelitian. Teori-teori tersebut berperan dalam memperluas pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang dikaji serta memberikan arah dalam menganalisis isu sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.[23]

1. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah istilah yang mengacu pada kekuasaan formal yang ada dasarnya ditetapkan melalui norma hukum yang berasal dari

[23] Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* 46-47

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

legislatif atau pelaksanaan kekuasaan administrasi.ini menegaskan bahwa pemberian kewenangan haruslah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum administrasi, penting untuk memahami asal-usul serta mekanisme perolehan wewenang oleh suatu organ pemerintahan, karena hal tersebut berkaitan erat dengan aspek pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) atas pelaksanaan kewenangan tersebut.[24]

Sedangkan kewenangan menurut Philipus M Hadjon kewenangan serta asalnya yang bervariasi, ada sebuah kewenangan yang dapat menghubungkan dengan kuasa serta memisahkannya antara atribusi, delegasi serta mandat. Kewenangan tersebut bisa kita lihat dari tiga sumber, antara lain kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, serta kewenangan mandat.[25]

a. Atribusi

Atribusi dipandang sebagai mekanisme utama memperoleh wewenang pemerintahan. Selain itu, atribusi juga diartikan sebagai pemberian wewenang untuk menetapkan suatu keputusan (besluit). Definisi lain menyatakan bahwa atribusi merupakan proses pembentukan suatu wewenang tertentu yang kemudian diberikan kepada organ tertentu dalam pemerintahan. Hanya organ yang memiliki dasar hukum dalam peraturan Perundang-undangan yang berwenang untuk membentuk dan mendistribusikan wewenang, secara prinsip, pembentukan dan distribusi

[24] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 68

[25] Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*: *Introductions to the Indonesia Administrative Law,* (Yogyakarta: UGM Press, 2008), 87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wewenang pemerintahan terutama ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

b. Delegasi

Merupakan bentuk proses pengalihan tanggung jawab pemerintahan antar organ pemerintahan. Dalam konteks inilah, delegasi dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada pejabat lain untuk menetapkan suatu keputusan tertentu. di mana setelah wewenang tersebut diserahkan, tanggung jawab pihak penerima delegasi memiliki kendali penuh atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

c. Mandat

Mandat adalah pelimpahan wewenang dari seorang pejabat kepada bawahannya, yang memungkinkan bawahan tersebut untuk mengambil keputusan atas nama pejabat yang memberikan mandat. Namun, keputusan yang diambil tetap dianggap sebagai keputusan dari pejabat pemberi mandat. Oleh karena itu, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.[26]

Kewenangan dalam pemerintahan bukan hanya sekedar hak, tetapi juga kewajiban yang diatur secara hukum. Kejelasan sumber kewenangan dan cara pelimpahannya sangat penting untuk memastikan efektivitas pemerintahan serta pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan. selain itu, perbedaan antara kewenangan horizontal dan vertikal mencerminkan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam sistem

[26] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor Tentang Administrasi Pemerintahan 30 tahun 2014, pasal 1 ayat (24).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintahan untuk menjaga keseimbangan dan efektivitas administrasi negara.

2. Teori Efektivitas Hukum

Pemikiran *Law as a tool of social engineering* menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk memperbarui atau membentuk masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan melalui instrumen hukum seperti peraturan daerah (Perda), yang ditunjukkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mengatur kehidupan sosial secara efisien guna menciptakan ketertiban, keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

Menurut Soerjono Soekanto hukum sebagai kaidah berfungsi untuk pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap pantas dalam suatu masyarakat. Dalam pendekatannya, terdapat dua cara berpikir utama dalam memahami hukum. Pertama, pendekatan deduktif-rasional yang melihat hukum sebagai sistem aturan yang bersifat dogmatis, di mana metode berpikir ini bertumpu pada logika dan teori yang sudah ada. Kedua, pendekatan induktif-empiris, yang menganggap hukum sebagai pola perilaku yang teratur dan berulang dalam masyarakat dengan tujuan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:[27]

[27] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, 30-31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Faktor Hukum

Hukum pada dasarnya memuat tiga unsur utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam penerapannya, ketiga unsur tersebut tidak selalu berjalan selaras, terutama ketika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berkaitan dengan penerapan aturan yang jelas terhadap suatu perkara konkret, sedangkan keadilan lebih menitikberatkan pada nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan dalam penyelesaian suatu persoalan. [28]

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah lembaga dan aparat yang memiliki kewenangan dalam membentuk, menerapkan, serta menegakkan ketentuan hukum. Keberadaan para penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, unsur penegakan hukum terdiri atas institusi hukum beserta sumber daya manusia yang menjalankan fungsi penegakan tersebut. Aparat yang termasuk di dalamnya meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, serta petugas pemasyarakatan yang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Rima Fadhilatunnisa, Ahmad Rama, Antonia Alda Resalda, Muhammad Sulthon, Robani Thai'ib, Rima Yuni Saputri, Dian Permata Sari, relevansi faktor penegakan hukum Menurut soerjono soekanto dalam Menghadapi fenomena cyber crime,"*Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, no. 1 April 2017 https://sihojurnal.com/index.php/pakehum/article/download/1432/1202

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung merupakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tercapainya suatu tujuan. Fasilitas tersebut tidak hanya berupa peralatan fisik, tetapi juga mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan, sistem organisasi yang berjalan secara efektif, serta dukungan anggaran yang memadai. Seluruh komponen tersebut memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk dalam proses penegakan hukum. Selain memastikan ketersediaannya, pemeliharaan fasilitas juga perlu diperhatikan secara berkelanjutan.[29] Hal ini bertujuan agar sarana pendukung dapat berfungsi secara optimal dan tidak justru menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman serta harmonis. Keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh peran aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh pandangan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi hukum yang melibatkan berbagai

[29] Soerjono Soekanto, *"Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum"* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal. 115

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum. Di samping itu, pembentukan peraturan perundang-undangan perlu mempertimbangkan perkembangan dan perubahan kondisi sosial agar ketentuan yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mengatur perilaku masyarakat secara efektif.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat, tetapi keduanya dapat dibedakan untuk memahami pengaruh masing-masing terhadap penegakan hukum. Pembahasan mengenai kebudayaan berfokus pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Dalam sistem hukum, terdapat tiga unsur utama yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Hukum juga berperan dalam mendorong perubahan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya untuk mengarahkan perubahan perilaku masyarakat melalui langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan terencana dikenal sebagai rekayasa sosial (*social engineering*). Agar hukum dapat memengaruhi perilaku masyarakat secara efektif, ketentuan hukum perlu disebarluaskan sehingga dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyebarluasan tersebut memerlukan sarana komunikasi yang memadai, salah satunya melalui mekanisme formal yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.[30]

[30] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hukum juga berperan dalam mendorong perubahan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya untuk mengarahkan perubahan perilaku masyarakat melalui langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan terencana dikenal sebagai rekayasa sosial (*social engineering*). Agar hukum dapat memengaruhi perilaku masyarakat secara efektif, ketentuan hukum perlu disebarluaskan sehingga dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyebarluasan tersebut memerlukan sarana komunikasi yang memadai, salah satunya melalui mekanisme formal yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.Dalam praktik pemerintahan pendekatan tersebut saling melengkapi dalam proses perumusan dan penerapan peraturan daerah. Pemerintah daerah untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal, kebiasaan, serta aspirasi masyarakat sebagai dasar pertimbangan kebijakan. Oleh karena itu, perda tidak hanya merupakan perangkat hukum yang normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan pengaturan hukum dengan realitas sosial yang berkembang di daerah, sekaligus sebagai alat pengarah perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

3. Konsep *Good Environmental Governance*

Konsep *good environmental governance* dipahami sebagai suatu model pengelolaan lingkungan yang menempatkan negara dan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya konservasi lingkungan. Negara memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sekaligus kemampuan melakukan perubahan besar terhadap kondisi lingkungan. Karena itu, keberlanjutan ekosistem sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu mengendalikan tindakannya berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan.[31]

Melalui kerangka tata kelola lingkungan yang baik ini, pengelolaan lingkungan dipandang sebagai hasil interaksi antara negara dan masyarakat, dengan tujuan memastikan tercapainya keseimbangan ekologis. Namun, penting dipahami bahwa peran negara bukan sekedar mengubah kondisi biofisik secara sepihak, melainkan memastikan bahwa arah, intensitas, dan batas pemanfaatan lingkungan tetap sejalan dengan kemampuan ekosistem untuk bertahan.

Menurut World Bank dalam Belbase *good environmental governance* (GEG) merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam yang menekankan pada keberlanjutan agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Konsep ini mencakup berbagai kebijakan, strategi, serta praktik yang mendukung tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan.[32]

Pelaksanaan GEG menuntut adanya kolaborasi lintas level, baik internasional, regional, maupun nasional. Oleh karena itu, keterbukaan akses terhadap informasi lingkungan serta keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Muh. Syainal Nur, Achmad Husen,"Good Environmental Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, no. 11 (1 januari 2022): 38-39, https://media.neliti.com/media/publications/457617-none-6bede289.

[32] Atalya Wian."Good Environmental Governance: Prinsip, Manfaat, dan Penerapan," *Mekari* (blog). Januari 23, 2024, https://mekari.com/blog/good-environmental-governance.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara keseluruhan, GEG dapat dipahami sebagai pendekatan yang komprehensif. Ia tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga mengintegrasikan prinsip etika, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan peda semua tingkatan kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan menurut International Union for Conservation (IUCN) *environmental governance* adalah cara masyarakat mengatur hubungan manusia dengan lingkungan melalui berbagai aktor (negara, pasar, dan masyarakat sipil) pada level lokal, nasional, regional, hingga global. Tata kelola ini berfungsi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berlangsung secara adil, transparan, partisipatif, serta berkelanjutan.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

IUCN mengadaptasi prinsip good governance ke dalam konteks lingkungan, yaitu:

a. Legitimasi dan akses adil

   Masyarakat harus mendapatkan akses yang setara terhadap informasi, sumber daya, serta proses pengambilan keputusan lingkungan. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal

b. Akuntabilitas

   Pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab atas keputusan yang berdampak pada lingkungan.

[33] Sunarto. "Environmental Governance. IUCN environmental Law Programme," *IUCN* (blog), Maret 8, 2014, https://iucn.org/our-work/governance-law-and-right.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Transparansi dan Partisipasi

Informasi terkait kondisi dan kebijakan lingkungan harus terbuka, mudah diakses, dan jelas bagi masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan lingkungan.

d. *Rule of Law* dan keberlanjutan

Regulasi lingkungan harus ditegakkan secara konsisten, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Setiap kebijakan atau praktik harus menjamin kelestarian sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa *environmental governance* atau tata kelola lingkungan merupakan sebuah pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Baik menurut World Bank maupun IUCN, inti dari konsep ini terletak pada upaya menjaga keberlanjutan ekosistem melalui keterlibatan berbagai faktor, mulai dari negara, masyarakat sipil, sektor swasta, hingga lembaga internasional.

Dengan demikian, environmental governance bukan sekedar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan suatu kerangka yang mengintegrasikan nilai keberlanjutan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah agar pengelolaan lingkungan dapat berlangsung secara adil, trasnsparan, partisipatif, serta berorientasi pada kelestarian jangka panjang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Teori Siyasah Tanfidziyah

Ibnu Abidin memaknai siyasah sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka menuju jalan keselamatan, baik didunia maupun di akhirat. Sumber siyasah, menurut beliau, bermuara pada ajaran Nabi, baik yang bersifat khusus maupun umum, dan mencakup dimensi lahir, siyasah dijalankan oleh para penguasa/sultan sebagai pemegang otoritas pemerintahan. Pada dimensi batin, siyasah bersumber dari para ulama sebagai pewaris para Nabi, bukan dari pemegang kekuasaan.

Dari sisi kebahasaan, kata siyasah memuat sejumlah makna, antara lain mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, merumuskan kebijakan, pemerintahan, dan politik. Secara *etimologis*, kata ini diturunkan dari akar *sasa*, yang bermakna mengatur atau memerintah, dan kemudian berkembang menjadi pengertian pengelolaan urusan politik, serta pengambilan keputusan. Dengan demikian, siyasah bertujuan untuk mengatur, memimpin, dan menetapkan berbagai urusan politik demi mencapai tujuan tertentu.[34]

Secara terminologis, siyasah dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengatur, mengelola, dan memimpin urusan masyarakat agar tercapai kemaslahatan bersama. Konsep siyasah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam urusan domestik maupun hubungan luar negeri, serta pengaturan kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaannya harus

[34] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen,2019), h. 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berlandaskan prinsip keadilan, keteraturan, dan konsistensi dalam mewujudkan kepentingan umum.

Secara etimologis, istilah siyasah berasal dari kata sasa yang memiliki makna mengatur, mengurus, atau memimpin. Dalam konteks pemerintahan, siyasah mencakup proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama terwujudnya kemaslahatan masyarakat.[35] Dengan demikian, siyasah tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencakup tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Siyasah Tanfidziyah Syar'iyyah merupakan bagian dari kajian fikih siyasah yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dan peraturan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana suatu ketentuan atau kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok sosial, termasuk masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat mendukung terciptanya keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat.[36]

Dalam perspektif Islam, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik memiliki landasan yang bersumber dari Al-

[35] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014) h. 3
[36] A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Prinsip-prinsip tersebut juga tercermin dalam praktik pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin serta perkembangan tata kelola pemerintahan Islam pada periode-periode berikutnya. Landasan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan harus diarahkan pada kemaslahatan umat, penegakan keadilan, dan pemenuhan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, Siyasah Tanfidziyah Syar'iyyah memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, konsep ini dapat digunakan sebagai perspektif untuk mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziya, ada ayat yang dapat dijadikan dasar etis untuk menilai pelaksanaan kebijakan pemerintah. Yakni QS. Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.[37]

[37] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Tajwid dan Terjemah*, (Denpasar: Qur'an Tajuwid, 2007),

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ayat diatas dapat menjadi landasan nilai bahwa kerusakan lingkungan harus dicegah. Dalam konteks penelitian, prinsip tersebut bisa digunakan untuk membahas pentingnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, termasuk pengurangan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan nilai untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pencegahan kerusakan dan kemaslahatan masyarakat.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan landasan mengenai pentingnya menghilangkan gangguan yang dapat merugikan orang lain. Salah satu hadis yang relevan adalah hadis tentang menyingkirkan gangguan dari jalan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (No 1009):

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

Artinya: Dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa menghilangkan sesuatu yang mengganggu atau membahayakan orang lain merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Dalam konteks pengelolaan sampah, kandungan hadis ini dapat dikaitkan dengan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, mencegah penumpukan sampah, serta mengurangi dampak sampah terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, hadis ini dapat menjadi landasan normatif dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip menghilangkan gangguan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kajian fikih, pelaksanaan kebijakan pemerintahan juga dapat dianalisis melalui kaidah-kaidah yang menekankan pencegahan kemudaratan dan pencapaian kemaslahatan. Kaidah fikih dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah. Dalam penelitian mengenai pengelolaan sampah, terdapat dua kaidah yang relevan, yaitu sebagai berikut.

a. Kaidah *Adh-Dhararu Yuzal*

الضارور يزال

Artinya: "Kemudaratan harus dihilangkan

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemudaratan yang terjadi harus diupayakan untuk dihilangkan atau diminimalkan. Dalam konteks pengelolaan sampah, prinsip tersebut berkaitan dengan upaya mencegah dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah perlu melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah secara optimal, termasuk melalui pengurangan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali, dan penanganan sampah. Dengan demikian, kaidah ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengurangi kemudaratan yang ditimbulkan oleh permasalahan sampah.

b. Kiadah *Tasarruful-Imami 'Alar-Ra'iyyati Manutun Bil-Maslahah*

تَصرُّفَ الْإِمَام علَى الرَّعيَّة منوطٌ بالْمَصْلَحَة

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemimpin harus berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Kaitannya dengan pengelolaan sampah, kebijakan yang dilaksanakan perlu memperhatikan kebutuhan pelayanan persampahan, ketersediaan fasilitas pengolahan, pengurangan sampah, serta pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna.

Berdasarkan uraian tersebut, ayat Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih memberikan landasan nilai yang dapat digunakan untuk memperkuat analisis Siyasah Tanfidziyah Syar'iyyah dalam penelitian ini. Prinsip pencegahan kerusakan, penghilangan kemudaratan, dan pencapaian kemaslahatan digunakan sebagai perspektif untuk menelaah pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023, tetapi juga mempertimbangkan tujuan kebijakan dalam melindungi lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

Pada konteks penelitian ilmiah di bidang hukum, sebelum pelaksanaannya perlu menggunakan metode yang sesuai, karena salah satu ciri utama ilmu pengetahuan adalah penggunaan metode yang sistematis. Kajian ilmiah harus dilakukan secara keberlanjutan dan didasarkan pada kasus-kasus konkret dan relevan.[38] Soerjono soekanto menegaskan bahwa metodologi merupakan turunan dari kata metode yang merupakan suatu cara berfikir yang digunakan dalam kegiatan penelitian, serta merupakan teknik umum dalam ilmu pengetahuan untuk menjalankan suatu prosedur. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan penelitian yang dipilih dalam kajian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Studi ini dilaksanakan dengan pendekatan hukum empiris, yang bertujuan untuk menelusuri dan menganalisi pelaksanaan hukum berdasarkan data dan kondisi lapangan di masyarakat. atau penelitian yang menelaah hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat.[39] Pada penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam Undang-Undang, tetapi juga sebagai sesuatu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pengelolaan sampah secara langsung di masyarakat.

[38] Arung Andreansyah, "Implikasi Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan (Di Pengadilan Agama Banyuwangi)" (Skripsi UIN Khas Jember, 2025), 41.

[39] Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dalam ranah hukum empiris mengacu pada sebuah metode yang mempelajari hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam sikap, penilaian, dan perilaku yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.[40] Berbeda dengan pendekatan hukum normatif, penelitian hukum empiris lebih menitikberatkan pada bagaimana hukum berfungsi dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dengan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

   Pendekatan sosiologi hukum merupakan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial berusaha memahami bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum melihat sistem hukum melalui perspektif ilmu sosial, dengan meneliti bagaimana aturan hukum dapat dipahami, diterapkan, serta berpengaruh pada perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.[41]

2. Pendekatan Perundang-Undangan

   Pendekatan Perundang-Undangan atau bisa di sebut penelitian dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan. Strategi pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan yang berlaku serta memiliki keterkaitan dengan peraturan Perundang-Undangan yang akan dipakai.[42] dalam penelitian ini yakni Perda Jember No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan sampah.

[40] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87
[41] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87
[42] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* 88-89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada doktrin serta pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep hukum yang telah ada.[43] Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewenangan pemerintah daerah, konsep pengelolaan dan pemanfaatan sampah, serta konsep efektivitas hukum. Konsep kewenangan pemerintah daerah digunakan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Konsep pengelolaan dan pemanfaatan sampah digunakan untuk memahami pelaksanaan pengurangan, pemilahan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah. Sementara itu, konsep efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, pendekatan konseptual membantu peneliti menghubungkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan praktik pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Lokasi Penelitian

Soerjono soekanto mengartikan lokasi penelitian sebagai tempat yang secara sengaja dipilih untuk menjalankan proses penelitian atau observasi guna memperoleh data yang akurat. Penentuan lokasi penelitian memiliki peran penting dalam memastikan ketepatan dan akuntabilitas hasil temuan yang

[43] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 88

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikumpulkan.[44] Maka dari itu, pemilihan tempat penelitian menjadi langkah awal yang penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, lokasi merujuk pada tempat atau letak suatu objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam studi ini berlokasi di Kabupaten Jember, menggunakan fokus tempatnya yakni kantor Dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK), kantor TPA Pakusari. Penentuan lokasi yang sesuai sangat krusial agar data yang dikumpulkan bersifat kontekstual dan merefleksikan situasi nyata di lapangan. Lokasi tersebut juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyaksikan langsung proses pengelolaan sampah secara faktual.

D. Subyek Penelitian

Untuk keperluan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan narasumber atau informan. Dari individu maupun kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti dan dapat memberikan informasi mendalam. Pemilihan subjek dilakukan menggunakan metode *Purposive sampling*, yang berarti pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi terhadap isu yang dikaji.[45]

Pada penelitian ini penulis mengambil subjek penelitian kepada Bapak Yanto Ankira sebagai Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Akhmad Baisofi, Kepala Bidang Administrasi UPT TPA Pakusari, Bapak Slamet masyarakat sekitar TPA

[44] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 3.

[45] Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 29-30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pakusari dan Ardiansyah Masyarakat sekitar TPS3R. Alasan penulis mengambil subjek tersebut ingin memperoleh data dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Melibatkan subjek yang beragam dan memiliki keterlibatan langsung dalam permasalahan pengelolaan sampah memberikan pemahaman yang lebih yang lebih menyeluruh serta beragam sudut pandang. Pendekatan ini turut meningkatkan valitidas data dan mendukung analisis yang lebih mendalam.

E. Sumber data

Sumber data merujuk pada berbagai jenis informasi yang diterapkan dalam studi ini guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Informasi ini dapat berasal dari beragam bentuk, seperti individu, dokumen, kejadian, atau objek yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Sumber data Primer

   Data primer adalah informasi utama yang didapatkan secara langsung dari sumber di lapangan . Data ini dihimpun menggunakan proses wawancara bersama informan yang memiliki kompetensi di bidangnya serta dapat dipercaya sebagai sumber informasi.[47]

2. Sumber data Sekunder

   Data sekunder diperoleh bukan langsung dari sumber utama, melainkan melalui bantuan pihak ketiga atau media atau juga dokumen tertulis yang berkaitan. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan

[46] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 119
[47] Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperkaya data primer yang telah dikumpulkan. Fungsinya adalah sebagai pelengkap dari informasi utama yang sudah ada.[48] Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan wawancara pihak terkait, serta melalui berbagai sumber tertulis seperti artikel, bacaan, atau dokumen yang relevan dengan penelitian.

Mengandalkan data dari beragam sumber memperkuat landasan dalam penyusunan argumen ilmiah dan membuka peluang untuk melakukan triangulasi guna memverifikasi keakuran informasi yang dikumpulkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pandangan Soerjono soekanto , teknik pengumpulan data adalah strategi yang digunakan peneliti untuk menghimpun data sesuai kebutuhan penelitian. Proses ini menjadi langkah krusial karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data yang akurat dan relevan.[49] Dalam studi ini menggunakan metode khusus dalam proses pengumpulan data. mencangkup berbagai metode yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Metode Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara atau bisa disebut tanya jawab adalah proses komunikasi di antara dua pihak yang melibatkan pertukaran informasi dan gagasan melalui dialog tanya jawab, yang bertujuan memperoleh pemahaman terhadap suatu isu. Teknik ini dipakai dalam pengumpulan data,

[48] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52
[49] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 120

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mulai dari studi pendahuluan untuk merumuskan masalah hingga penggalian data lebih rinci dari responden.[50]

2. Metode Observasi

Metode Observasi, atau dikenal sebagai pengamatan, adalah proses mengarahkan perhatian pada suatu objek dengan melibatkan seluruh indra. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui persepsi Indrawi, yang kemudian dicatat secara rinci guna mendukung penelitian.[51]

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memeriksa atau mengkaji dokumen yang telah tersedia. Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis, gambar, maupun hasil karya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.[52] Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dalam metode penelitian kualitatif, khususnya dalam mendukung informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung serta interaksi tanya jawab dengan narasumber.

Teknik ini memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang diperoleh bersifat komprehensif serta memungkinkan eksplorasi data secara mendalam, mencakup dimensi normatif dan praktis.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses di mana data yang akan dilakukan mencakup serentetan tahapan yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai bagaimana data akan diolah prosedur ini meliputi

[50] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 128
[51] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 129
[52] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelacakan data, pengaturan data, serta klasifikasi data.[53] Peneliti dalam menganalisis data terlebih dahulu mengumpulkan berbagai informasi sebelum melakukan interpretasi. Dengan harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Terdapat tiga elemen utama teknik analisis data, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Dalam tahap awal analisis, data lapangan dicatat secara mendetail dan teliti. Data tersebut kemudian disederhanakan melalui proses reduksi untuk menghindari penumpukan informasi. Proses ini melibatkan peringkasan, penentuan poin-poin kunci, dan pengarahan fokus pada inti permasalahan, sehingga informasi yang tidak relevan dapat diabaikan.[54] Informasi hasil dari wawancara diorganisasi secara terstruktur guna mempermudah penarikan kesimpulan serta memperkuat proses pengumpulan data selanjutnya dengan penyajian yang lebih jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Penyajian Data

   Penyajian data adalah proses penataan informasi secara sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan pemahaman atas kondisi yang terjadi. Data disusun berdasarkan poin-poin kunci yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya hasil wawancara yang diorganisasikan menurut urutan identifikasi masalah. Dengan demikian, penyajian data tidak hanya menggambarkan kesimpulan yang dapat diambil, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan dengan menampilkan informasi secara terstruktur.[55] Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, sesuai

[53] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 68-69
[54] Nur Sholikin, *PengantarMetodologi Penelitian Hukum*, 135
[55] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 70

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan arah dan fokus kajian mengenai "Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah (studi tugas dan wewenang pemerintahan daerah dalam pemanfaatan sampah di TPA Pakusari, Jember)".

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian dihasilkan melalui verifikasi dengan meninjau ulang catatan lapangan dan mengajukan pertanyaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan perbandingan antara hasil wawancara dengan informan dan temuan langsung di lapangan, guna memperoleh pemahaman yang lebih cepat dan mendalam.[56]

Analisis yang dilakukan secara sistematis membentuk dasar berfikir ilmiah dalam mengelola temuan lapangan, sehingga keluaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan relevan dalam menjawab permasalahan secara objektif.

H. Keabsahan Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keabsahan data merupakan tahap akhir pada penelitian kualitatif, namun hal ini tidak menutup kemungkinan peneliti untuk kembali ke lapangan jika diperlukan. Jika ditemukan kebutuhan untuk menguatkan temuan dengan data tambahan, peneliti dapat mengumpulkan data baru guna mendukung bukti yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, keabsahan data diperiksa melalui penerapan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode yang membandingkan dan memverifikasi data dengan menggabungkan informasi dari sumber lain di luar data utama. Teknik ini mencangkup dua pendekatan, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.[57]

---

[56] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 137

[57] Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, J, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 100

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Triangulasi sumber melibatkan penyatuan dan pencocokan tingkat kepercayaan dari data yang diperoleh melalui waktu dan menggunakan alat yang berbeda. Sementara itu, triangulasi metode berarti menerapkan pola pengumpulan data yang bervariasi, seperti wawancara dengan pendekatan berbeda, untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh.[58]

Penerapan triangulasi memegang peranan krusial dalam penelitian hukum empiris karena mampu meningkatkan validitas serta reliabilitas data. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak terpaku pada satu sumber atau perspektif saja, melainkan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan objektif terkait praktik pengelolaan sampah di lapangan.

I. Tahap-tahap dalam proses penelitian

Tahapan penelitian merupakan penjabaran dari rencana tindakan yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menyusun rencana yang terstruktur dengan beberapa tahap meliputi:

1. Tahapan Pra-penelitian
    a. Merancang desain penelitian
    b. Menghimpun referensi atau litelatur yang relevan
    c. Menetapkan tempat atau lokasi pelaksanaan penelitian
    d. Pengamatan lokasi penelitian
    e. Memilih narasumber
    f. Melaksanakan seminar proposal

[58] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tahap pelaksanaan penelitian di lapangan
    a. Mempelajari latar belakang penelitian
    b. Mengurus surat izin penelitian
    c. Mendatangi lokasi penelitian
    d. Mengumpulkan data penelitian
    e. Menganalisis data
    f. Interpretasi data sesuai hasil analisa
    g. Menarik kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi data
3. Tahap sesudah penelitian
    a. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai hasil penelitian dan Menyusun laporan akhir dari kegiatan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TPA Pakusari, Kabupaten Jember, karena lokasi ini merupakan satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah yang secara langsung dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember, yaitu instansi pemerintahan daerah yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa TPA Pakusari mengalami kelebihan kapasitas dan menampung volume sampah yang sangat tinggi setiap harinya, yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember dan TPA Pakusari serta Kedudukan Bupati Jember

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan struktur perangkat daerah. Instansi ini bersetatus sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.[59] Dipimpin oleh seorang kepala dinas, Dinas Lingkungan Hidup berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah. DLH merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam

[59] Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember, pasal 17 ayat (1-4).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bidang lingkungan hidup, dengan tugas utama mengatur, mengawasi, serta mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kerjanya.

Bupati Jember memiliki kedudukan sebagai kepala daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kabupaten, termasuk urusan wajib bidang lingkungan hidup. Kedudukan ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 3 Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebut "Bupati adalah Bupati Jember", [60]serta dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, yang menempatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tegas dalam Perbub Jember No. 9 Tahun 2021 pasal 2 ayat (2).[61]

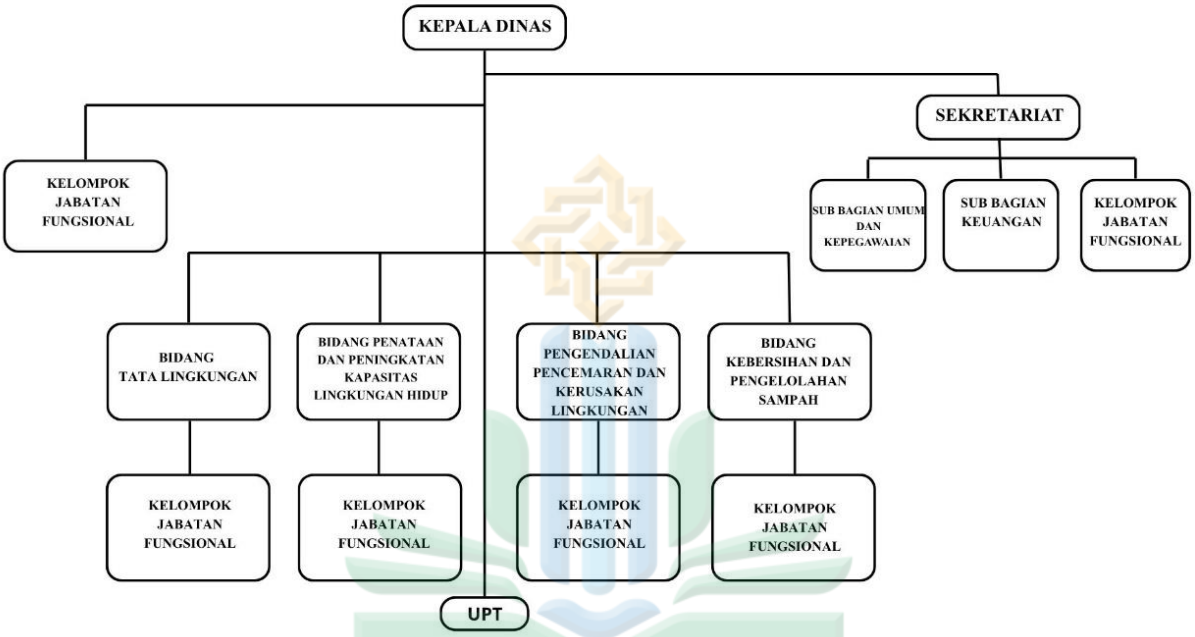
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagai kepala daerah, Bupati memiliki fungsi strategis dalam menetapkan arah kebijakan, strategi, dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Perda Nomor 2 Tahun 2023, kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah "ditetapkan dengan peraturan Bupati".[62] Ketentuan ini menegaskan peran normatif Bupati sebagai penentu arah kebijakan pengelolaan sampah daerah yang berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi.

[60] Setda Kabupaten Jember, Perda No. 3 tahun 2023, pasal 1 ayat (3).
[61] Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 9 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember.
[62] Setda Kabupaten Jember, Perda No. 3 tahun 2023, pasal 7 ayat (4)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember[63]



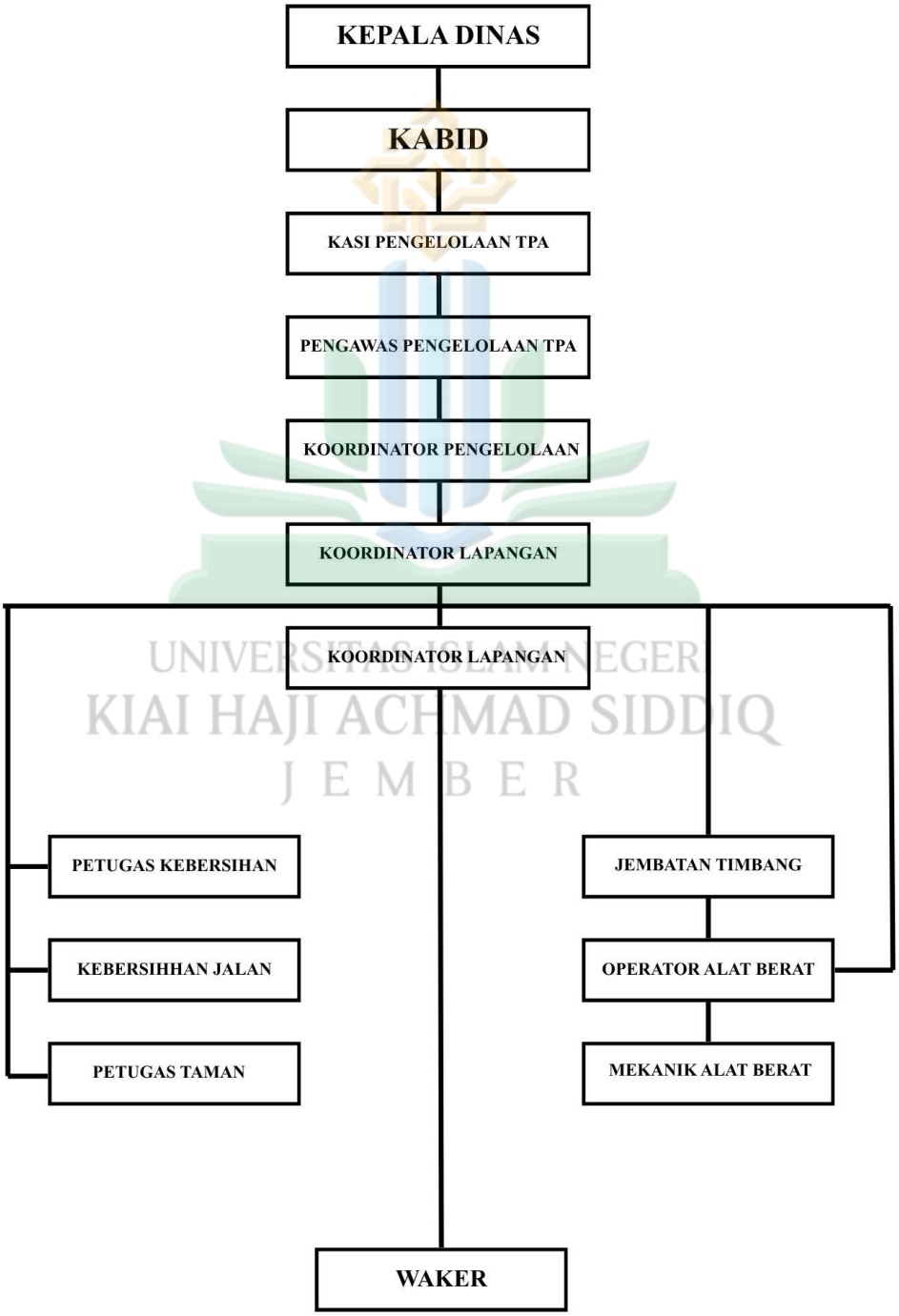
TPA Pakusari di Kabupaten Jember mulai beroperasi sekitar tahun 1991-1992 dan berfungsi sebagai tempat pembungan akhir sampah. Berlokasi di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, kawasan ini pada awalnya identik dengan bau tidak sedap serta tampilan yang kumuh. Namun, seiring perkembangannya, sebagian area TPA di alih fungsikan menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik, dilengkapi dengan taman, tempat foto berbahan barang bekas, serta pelatihan pengelolaan sampah. Tempat yang dulunya sepi pengunjung kini justru semakin diminati masyarakat.

[63] "Dinas Lingkungan Hidup Jember." Struktur Organisasi DLH, https://dlhjember.co.id/struktur/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 4.2
Struktur Organisasi TPA Pakusari Kabupaten Jember[64]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] TPA Pakusari Jember,"Struktur Organisasi TPA Pakusari," 1 Juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember dan TPA Pakusari

a. Visi

Adapun visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, yakni terwujudnya Jember yang sejahtera berakhlakul karimah dan berdaya saing.

Sedangkan visi TPA Pakusari tercapainya sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Jember, dengan pengembangan TPA regional yang modern serta ramah lingkungan. Selain itu, mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mendaur ulang sampah sehingga dapat menekan volume sampah yang masuk ke TPA.

b. Misi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk secara kolaboratif meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan mutu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, disertai dengan tata kelola pemerintahan yang profesional dan Berintegritas, Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Ramah lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.

TPA Pakusari mempunyai misi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, peningkatan edukasi serta pemberdayaan masyarakat, upaya penghijauan dan perbaikan kualitas lingkungan, penyediaan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fasilitas untuk pemanfaatan kembali sampah, serta pembangunan infrastruktur TPA.

3. Tugas Pokok Dan Funngsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan TPA Pakusari

Adapun tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup mendukung Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, termasuk menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, yang seluruhnya dilaksanakan selaras dengan visi, misi, dan program kerja Walikota sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Jember juga mempunyai fungsi di antaranya sebagai berikut:

a. Menyusun kebijakan teknis terkait pelaksanaan urusan pemerintahan di sektor lingkungan hidup.
b. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan di bidang lingkungan hidup.
c. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup.
d. Menyelenggarakan Administrasi Dinas yang berkaitan dengan urusan lengkungan hidup.
e. Mengelola unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah koordinasi dinas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f. Menjalankan tugas tambahan dari kepala daerah yang masih relevan dengan fungsi dan tanggung jawab dinas.

Dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah diberi kewajiban melaksanakan pengelolaan sampah yang meliputi.

a. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali.
b. Penanganan sampah mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di daerah.
d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam Pasal 5 Perda No. 2 Tahun 2023, tugas Dinas Lingkungan Hidup ditegaskan lebih rinci tugas menyusun dan menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan sampah. Menyelenggarakan program pengurangan dan penanganan sampah. menyediakan sarana prasarana persampahan (TPS3R, armada angkut, TPA). melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap TPS, TPS3R, serta TPA. Melakukan penelitian, pengembangan, serta penerapan teknologi pengelolaan sampah. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.[66]

[65] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 5 dan 20

[66] Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Jember, pasal 5

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan pasal 6 Perda No. 2 Tahun 2023, wewenang Dinas Lingkungan Hidup memuat menetapkan lokasi pengelolaan sampah. Melakukan penegakkan aturan perda terkait persampahan. Menetapkan standar operasional pengelolaan sampah. Mengelola kerja sama dengan pihak ketiga/swasta dalam pengelolaan sampah.[67]

Sedangkan tugas pokok TPA Pakusari yakni sebagai sarana pengelolaan akhir sampah yang aman dan terkontrol bagi masyarakat Kabupaten Jember, TPA ini berperan menampung serta mengelola limbah dengan menerapkan sistem *controlled landfill*, yaitu melalui proses perataan dan pemadatan sampah, penimbunan tanah secara berkala, serta berbagai edukasi terkait pengelolaan sampah untuk meminimalkan dampak lingkungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagai unit teknis pelaksana di bawah Dinas Lingkungan Hidup, UPT TPA Pakusari bertugas langsung di lapangan. Secara umum, tugas pokok dan fungsinya adalah:

a. Pengelolaan operasional TPA menerima, menata, dan menimbun sampah yang masuk.
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana TPA termasuk alat berat, jalan masuk, dan saluran lindi.
c. Pengawasan dampak lingkungan memantau pencemaran air tanah, udara, dan kesehatan masyarakat sekitar.

[67] Setda Kabupaten Jember, Perda No. 3 tahun 2023, pasal 6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan TPS3R memastikan alur sampah dari hulu hingga ke TPA.

e. Pelaporan menyampaikan laporan volume sampah harian dan kondisi TPA ke DLH.

4. Alamat Kantor

Dalam hal ini alamat lokasi kantor Dinas lingkungan Hidup Jember terletak di Jl. Supriadi No.52, Jawaan, Patemon, Kec.Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kode pos 68191. Website: https://dlhjember.co.id .

Untuk UPT TPA Pakusari alamat lokasi terletak di Dusun Krajan, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kode pos 68181.

5. Kondisi Umum Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jember secara umum terdiri atas tahapan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas Dinas Lingkungan Hidup, sebagian besar sampah yang di angkut berasal dari kawasan perkotaan, sedangkan wilayah pedesaan masih banyak yang membuang sampah ke sungai atau lahan kosong.[68]

Upaya pengurangan sampah telah dilakukan melalui program TPS 3R (Tempat pengolahan Sampah *Reduce*, *Reuse*, *Recyle*) dan Bank Sampah (BSU) yang tersebar di beberapa kecamatan. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya partisipasi masyarakat dan minimnya fasilitas

[68] Observasi di DLH Jember, 10 Juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemilahan di sumber. Dinas Lingkungan Hidup Jember telah menggagas program "Jember Bersih 2025", dengan visi mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA hingga 30% melalui optimalisasi daur ulang dan edukasi masyarakat.

6. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember

Landasan hukum yang menjadi dasar operasional Dinas Lingkungan Hidup dan TPA Pakusari dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur:

1. Pasal 5 dan 6: Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
2. Pasal 9 ayat (1): Pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menetapkan lokasi TPA, serta melakukan pembinaan dan pengawasan.
3. Pasal 20 ayat (1): Menetapkan prinsip pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali (3)

b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur:

1. Pasal 4: Tujuan pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pasal 5: Tugas pemerintah daerah dalam menumbuhkan kesadaran, memfasilitasi, dan melaksanakan pengelolaan sampah.
3. Pasal 6: Wewenang pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan dan strategi daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menentukan lokasi TPA.
4. Pasal 22: Kewajiban penerapan sistem *sanitary landffil* pada tempat pemrosesan akhir untuk menjamin keamanan dan berkelanjutan lingkungan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis berisi kumpulan hasil penelitian yang telah diperoleh, kemudian ditampilkan serta dianalisis guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai temuan penelitian. Berikut ini adalah berbagai data penelitian yang sudah diperoleh, sesuai dengan konteks, subjek, dan lokasi yang diteliti, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 menjadi dasar hukum penyelenggaraan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten. Dalam naskah Perda yang digunakan pada penelitian ini, Pasal 4 menegaskan tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pasal 5 mengatur tugas Pemerintah Daerah, sedangkan Pasal 6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengatur kewenangannya. Adapun Pasal 12 mengarahkan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan tidak cukup hanya berupa pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga perlu mendorong pengurangan dan pemanfaatan sampah.

wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah telah diatur secara jelas dalam regulasi nasional maupun perda, pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, penanganan, hingga pembinaan terhadap masyarakat. Hal ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, yang memberikan kerangka hukum bagi pemerintah Dalam pelaksanaannya, kewenangan pemerintah daerah tersebut dilaksanakan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai perangkat daerah yang mengatur kebijakan teknis dan melakukan pembinaan, serta UPT TPA Pakusari sebagai unit pelaksana teknis yang menangani operasional persampahan. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan baik sebagai subjek yang perlu dibina maupun sebagai mitra aktif dalam upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah. Yanto Ankira selaku Kepala Bidang Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Mengungkapkan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Di DLH perda menjadi dasar hukum bagi program persampahan, terutama pengembangan TPS3R dan pembinaan bank sampah. Tujuan program ini adalah menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA dengan mendorong pemilahan sejak rumah tangga"[69]

Berdasarkan wawancara dengan Yanto Ankira selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Jember, Perda menjadi dasar hukum bagi program persampahan, terutama pengembangan TPS3R dan pembinaan bank sampah. Program tersebut diarahkan untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA dengan mendorong pemilahan sejak dari rumah tangga. Keterangan ini memperlihatkan bahwa pada tingkat perencanaan, Pemerintah Daerah telah menempatkan pengurangan sampah sebagai bagian dari arah kebijakan, bukan hanya berfokus pada pengangkutan dan pemrosesan akhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Gambar 4.3
Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Jember[70]

[69] Yanto Ankira, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Juli 2025
[70] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, "Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup," 22 Agustus 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumentasi Rencana Strategis DLH yang diamati peneliti juga memuat arah kebijakan berupa peningkatan pengurangan timbulan sampah, pengembangan TPS3R, dan bank sampah. Meskipun demikian, observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih terbatas. Peneliti mencatat hanya satu TPS3R yang berfungsi maksimal, sementara sarana pemilahan di sejumlah TPS belum memadai.[71] Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara perencanaan program dan pelaksanaan di lapangan.

Di TPA Pakusari, kegiatan pemanfaatan sampah telah berlangsung melalui pengomposan sampah organik, budidaya maggot, serta pemilahan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam oleh pemulung. Sampah organik dimanfaatkan sebagai bahan kompos atau pakan maggot, sedangkan sebagian sampah anorganik dikumpulkan untuk dijual kembali atau diolah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya praktik pemanfaatan sampah, tetapi skalanya masih kecil dibandingkan jumlah sampah yang masuk setiap hari. Akhmad Baisofi Kepala Bidang Administrasi UPT TPA Pakusari menyatakan:

> "Setiap hari sekitar 190 ton sampah masuk ke TPA. Dari jumlah itu, hanya kurang dari 5 persen yang bisa kami manfaatkan kembali. Sisanya menumpuk, kami tahu perda mengamanatkan *sanitary landfill*, tapi alat berat kami terbatas, dan lahan juga semakin sempit. Jadi yang bisa dilakukan hanya menutup sebagian sampah dengan tanah seadanya"[72]

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah yang mengamanatkan sistem *sanitary landfill* belum berjalan secara optimal.

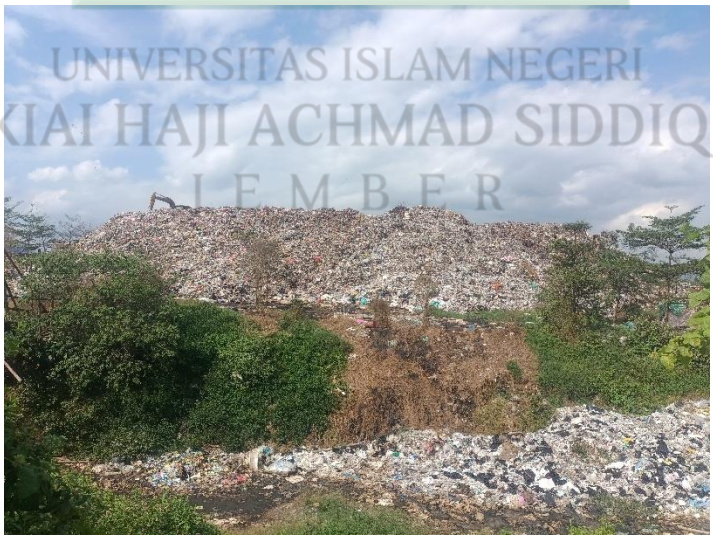
[71] Observasi di DLH Jember, 10 Juli 2025
[72] Akhmad Baisofi, diwawancara oleh penulis, Jember, 1 Juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kondisi ini membuat pengelolaan sampah hanya sebatas timbunan dengan tanah secara sederhana, sehingga belum sesuai dengan standar *sanitary landfill* sebagaimana diatur dalam kebijakan.

Hasil observasi peneliti memperlihatkan bahwa pengelolaan di TPA masih didominasi penumpukan sampah dan belum sepenuhnya menerapkan sanitary landfill sebagaimana disebut dalam Perda. Sebagian alat berat ditemukan dalam kondisi rusak atau tidak berfungsi, sementara lahan yang tersedia semakin terbatas. Area pengomposan dan budidaya maggot memang tersedia, tetapi kapasitasnya belum mampu mengimbangi volume sampah harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan telah dimulai, namun belum menjadi sistem pengelolaan yang dominan.[73]



Gambar. 4.4
Dokumentasi lapangan gunungan sampah *overload* kapasitas

Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung implementasi perda, terutama melalui pemilahan sampah sejak dari sumber. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya penyuluhan dari pemerintah

[73] Observasi di TPA Pakusari, 20 Agustus 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi hambatan eksternal utama. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ardiansyah selaku masyarakat sekitar TPA, menyatakan:

> "Warga di sini belum pernah mendapatkan penyuluhan dari pemerintah tentang pemilahan atau pemanfaatan sampah. Menurut saya warga bersedia jikalau ada pelatihan mengenai sampah, tetapi hingga kini fasilitas tersebut belum ada."[74]

Hasil observasi mendukung keterangan tersebut: sampah rumah tangga masih sering dibuang dalam keadaan tercampur, sedangkan pemilahan lebih banyak dilakukan terhadap sampah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, implementasi kewenangan Pemerintah Daerah sudah terlihat melalui perencanaan, pengangkutan, penyediaan sejumlah fasilitas, dan kegiatan pemanfaatan terbatas. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena kapasitas pengolahan masih rendah, metode pemrosesan akhir belum sesuai dengan ketentuan yang dirujuk dalam penelitian, dan edukasi pemilahan di tingkat masyarakat belum berjalan merata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Pemanfaatan Sampah.

a. Faktor Penghambat

Perda No. 2 Tahun 2023 tentu tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang dapat memengaruhi efektivitasnya. Hambatan tersebut dapat bersifat internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia,

[74] Ardiansyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 31 Agustus 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Faktor internal ini sering kali membuat pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan normatif yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Selain itu, hambatan juga datang dari faktor eksternal, kendala sosial budaya dalam mengubah pola perilaku pengelolaan sampah, serta pengaruh kondisi lingkungan yang dinamis. Tantangan-tantangan eksternal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif, agar pelaksanaan Perda tidak hanya sebatas formalitas administratif, tetapi benar-benar dapat menjawab persoalan pengelolaan sampah secara nyata di tingkat daerah. Wawancara peneliti kepada bapak Yanto Ankira Kepala bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. Mengungkapkan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Kami untuk penanganan sampah hambatan utama terletak pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Sarana prasarana pengelolaan sampah yang masih belum cukup untuk pilah olah sampah. Dan masih minimnya bank sampah di setiap desa."[75]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penanganan sampah di tingkat daerah terletak pada aspek sumber daya dan infrastruktur. Keterbatasan anggaran serta jumlah sumber daya manusia yang tersedia membuat proses pengelolaan sampah tidak dapat berjalan secara optimal sesuai dengan amanat regulasi. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memadai untuk mendukung kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

[75] Yanto Ankira, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Peneliti mengamati waktu observasi bahwa hanya ada 1 TPS3R yang berfungsi maksimal, dan TPS di berbagai Desa/Keluharan tidak dilengkapi alat pemilah yang baik. kurangnya transportasi pengangkut sampah, sampai saat ini cakupan wilayah yang terlayani pengangkutan sampah sebanyak 25 Kecamatan, dan terdapat 6 Kecamatan yang belum terlayani pelayanan sampah. Pelaku usaha yang masih rendah tentang pengelolaan sampah.[76]

Sebagai garda terdepan pengelolaan sampah harian, UPT TPA Pakusari memiliki beban operasional paling besar dalam melaksanakan tugas penanganan sampah. Hampir seluruh sampah dari Kabupaten Jember bermuara ke lokasi ini, sehingga kapasitas dan kualitas pengelolaan TPA menentukan keberhasilan implementasi perda. Namun, keterbatasan sarana prasarana, terutama kerusakan alat berat dan lahan terbatas, menjadi hambatan serius. Selain itu, tantangan lingkungan seperti pencemaran bau dan air lindi semakin menambah kompleksitas masalah. Hasil wawancara kepada Akhmad Baisofi kepala Bidang Administrasi TPA Pakusari mengungkapkan:

> "Sampah yang masuk setiap hari mencapai 190 ton, tetapi yang bisa dikelola tidak lebih dari 10 ton. Keterbatasan alat berat dan metode pengolahan membuat sampah menumpuk. Risiko longsor di musim hujan dan kebakaran di musim kemarau menjadi tantangan besar. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah tangga memperburuk kondisi di TPA.

Penjelasan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kemampuan TPA dalam menangani sampah masih sangat terbatas

[76] Observasi di DLH Jember, 10 Juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dibandingkan dengan timbunan yang ada. Keterbatasan alat berat dan metode pengolahan menjadi faktor utama yang menyebabkan sampah hanya ditimbun tanpa pengelolaan lanjutan. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya risiko lingkungan yang serius.

Waktu observasi peneliti menemukan TPA Pakusari masih menggunakan metode *open dumpling*, bau sampah yang menyengat sampai permukiman sampah. Alat berat sebagian tidak berfungsi atau rusak, menjadikan proses pengolahan lambat. Meski ada area pengomposan dan budidaya maggot, kapasitasnya tidak mampu mengimbangi jumlah sampah harian.[77]



Gambar. 4.5
Foto alat berat rusak[78]

Dokumentasi alat berat yang rusak di TPA menunjukkan tantangan teknis utama dalam pengelolaan sampah. Ketiadaan alat yang memadai membuat proses *sanitary landfill* tidak dapat dilaksanakan sesuai standar.

[77] Observasi di TPA Pakusari, 20 Agustus 2025
[78] TPA Pakusari, "Foto Alat Berat Rusak," 1 Juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Faktor Pendukung

Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember adalah tersedianya dasar hukum yang mengatur tugas dan wewenang pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Keberadaan peraturan daerah tersebut memberikan landasan normatif bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, mulai dari upaya pengurangan, penanganan, hingga pemanfaatan sampah. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan pengelolaan sampah tidak hanya didasarkan pada kebijakan atau tindakan administratif, tetapi juga memiliki pedoman yang harus dijadikan acuan oleh instansi pelaksana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan daerah tersebut memiliki arti penting karena pengelolaan sampah merupakan persoalan yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang jelas agar pelaksanaan program pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terarah dan memiliki pembagian tugas serta wewenang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 menjadi salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keberadaan dasar hukum juga dapat mendukung koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan unit pelaksana teknis yang menjalankan kegiatan pengelolaan sampah di lapangan, termasuk UPT TPA Pakusari. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta upaya pemanfaatan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga menjadi pedoman bagi penyelenggaraan program pengelolaan sampah.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sarana/Indikator Sasaran	**% capaian**	**Predikat Kinerja**				
		Sangat Tinngi	**Tinggi**	**Sedang**	**Rendah**	**Sangat rendah**
Sasaran 3 Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota						
Indikator 1.1 Persentase Sampah yang tertangani	51,93%	-	-	-	~	-
Indikator Persentase Pengendalian Limbah B3	100%	~	-	-	-	-
Rata-rata capaian	**75,96%**					

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adanya perencanaan dan strategi pengelolaan sampah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Berdasarkan dokumen dan hasil penelitian yang telah diperoleh, arah perencanaan tersebut antara lain berkaitan dengan pengembangan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS3R) serta pembinaan dan pengembangan bank sampah. Perencanaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya diarahkan pada kegiatan pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir, tetapi juga mencakup upaya mengurangi dan memanfaatkan sampah sebelum masuk ke TPA.

Adanya perencanaan strategis merupakan faktor pendukung karena dapat menjadi pedoman bagi instansi pelaksana dalam menentukan program, menetapkan sasaran, dan mengarahkan penggunaan sumber daya. Melalui perencanaan tersebut, kegiatan pengelolaan sampah diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Pengembangan TPS3R, misalnya, dapat mendukung pemilahan dan pengolahan sampah pada tingkat yang lebih dekat dengan sumbernya, sedangkan bank sampah dapat mendorong masyarakat untuk mengelola sampah yang masih memiliki nilai guna atau nilai ekonomi.

Hasil observasi juga menunjukkan adanya program yang telah dijalankan, seperti pembinaan bank sampah dan pengembangan TPS3R di sejumlah wilayah. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini memperlihatkan bahwa keberadaan perencanaan strategis perlu diikuti dengan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar program yang telah direncanakan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran.[79]

Faktor pendukung selanjutnya adalah adanya kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sampah yang telah dilaksanakan di TPA Pakusari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Akhmad Baisofi selaku Kepala Bidang Administrasi TPA Pakusari, kegiatan yang dilakukan antara lain pemilahan sampah oleh pemulung, pengolahan sampah organik menjadi kompos dan pakan maggot, serta pemanfaatan sebagian sampah anorganik menjadi kerajinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa di lokasi penelitian telah terdapat aktivitas yang tidak hanya berorientasi pada penampungan sampah, tetapi juga berupaya memanfaatkan sebagian sampah yang masih memiliki nilai guna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.6
Tempat Budidaya Maggot dan Kompos[80]

[79] Observasi di DLH Jember, 10 Juli 2025
[80] TPA Pakusari, "Foto Tempat Budidaya Maggot dan Kompos," 1 Juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Budidaya maggot dapat menjadi salah satu cara memanfaatkan sampah organik tertentu sebagai bahan pakan dalam proses budidaya. Di sisi lain, pemilahan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam memungkinkan material yang masih bernilai untuk dipisahkan dan dimanfaatkan kembali. Berbagai kegiatan tersebut menjadi potensi pendukung bagi pengelolaan sampah yang lebih berorientasi pada pengurangan dan pemanfaatan.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sampah di TPA Pakusari merupakan faktor pendukung yang terlihat secara empiris. Keberadaan kegiatan tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk mengolah sebagian sampah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar potensi pemanfaatan sampah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengurangan timbunan sampah dan perlindungan lingkungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Fungsi Pemerintah Daerah dalam menghadapi permasalahan sampah terkait tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menghadapi permasalahan sampah karena pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat pembuangan dan pengangkutan sampah, tetapi juga mencakup upaya pengurangan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap dampak yang ditimbulkan. Pelaksanaan peran tersebut membutuhkan kebijakan yang jelas, dukungan sarana dan prasarana, keterlibatan aparatur pelaksana, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup dinilai dari tersedianya peraturan atau fasilitas, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk mengetahui pelaksanaan peran tersebut, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai pengalaman dan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pengelolaan sampah dan lingkungan sekitar. Dokumentasi berupa foto digunakan sebagai bukti visual atas kondisi yang ditemukan di lapangan, sedangkan dokumen tertulis, seperti peraturan daerah dan dokumen perencanaan yang relevan, digunakan untuk menelaah dasar hukum serta arah kebijakan pemerintah daerah. Penggunaan beberapa sumber tersebut membantu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah.

Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan sampah. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang menghasilkan sampah, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya. Oleh karena itu, sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan diperlukan agar masyarakat memahami cara pengelolaan sampah yang benar serta mengetahui bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah. Hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wawancara penulis dengan Slamet masyarakat sekitar TPA Pakusari, mengungkapkan

> "Setau saya belum pernah ada penyuluhan atau pelatihan dari pemerintah terkait pemilahan sampah. Memang adanya TPA itu warga tidak susah untuk membuang sampah, tapi cara cepat dari warga sampah kami kumpulkan jadi satu di kantong plastik dan diambil oleh petugasnya. Kalau kami menilai bahwa peran pemerintah daerah masih terbatas pada TPS dan pengangkutan, serta tidak ada pemberdayaan warga secara optimal.[81]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Pakusari, diperoleh keterangan bahwa masyarakat belum pernah mendapatkan penyuluhan atau pelatihan dari pemerintah mengenai pemilahan sampah. Dalam keterangannya, beliau menjelaskan bahwa sampah rumah tangga biasanya dikumpulkan dalam satu kantong plastik untuk kemudian diambil oleh petugas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pengangkutan sampah telah dirasakan masyarakat, tetapi pembinaan mengenai pemilahan sampah dari sumbernya belum dirasakan secara optimal oleh narasumber.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar. 4.7
Dokumentasi foto aktivitas masyarakat membuang sampah tanpa pemilahan[82]

[81] Slamet, diwawancarai oleh Penulis, Jember 31 Agustus 2025
[82] TPA Pakusari, "Foto Aktivitas Masyarakat Membuang Sampah tanpa Pemilahan," 31 Agustus 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Peneliti menemukan bahwa sampah rumah tangga masih dibuang dalam keadaan tercampur. Pemilahan sampah lebih banyak dilakukan oleh pemulung untuk kepentingan ekonomi setelah sampah terkumpul, bukan sebagai hasil pemilahan yang dilakukan masyarakat sejak dari rumah. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat sejak dari sumbernya dan praktik yang ditemukan di lapangan.

Sebagai bukti visual, penelitian ini juga dilengkapi dengan dokumentasi foto aktivitas masyarakat membuang sampah tanpa pemilahan. Foto tersebut memperlihatkan kondisi yang sejalan dengan hasil observasi mengenai kebiasaan membuang sampah secara tercampur. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pendukung atas kondisi yang diamati peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan rangkaian data tersebut, peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyuluhan, pelatihan, dan pembiasaan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Temuan ini didasarkan pada keterangan narasumber dan kondisi yang diamati peneliti, sehingga tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa seluruh program pembinaan pemerintah daerah sama sekali tidak pernah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jember.

Hasil observasi peneliti di sekitar lingkungan warga TPA Pakusari menemukan adanya sampah yang berserakan di saluran air dan aliran sungai. Peneliti juga mencatat adanya bau tidak sedap di sekitar aliran air tersebut.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan sampah tidak hanya ditemukan pada tahap pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga berkaitan dengan kebersihan lingkungan di sekitar permukiman masyarakat.



Gambar 4.8
Dokumentasi foto sungai tercemar[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

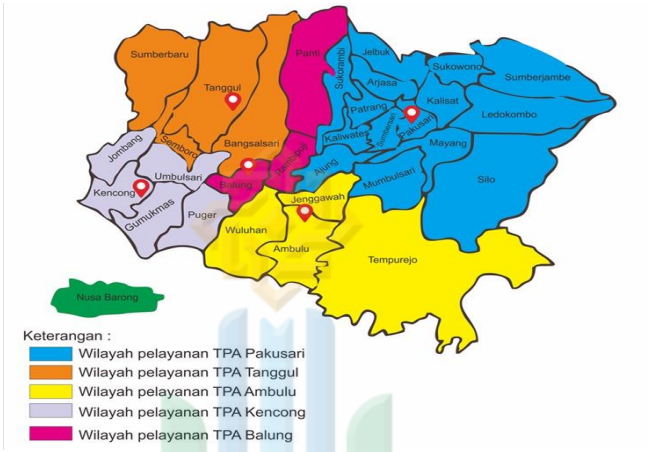
Temuan observasi tersebut didukung oleh dokumentasi foto sungai tercemar di sekitar permukiman. Foto ini digunakan untuk memperlihatkan kondisi lingkungan yang ditemukan pada saat penelitian. Meskipun demikian, dokumentasi visual tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan penyebab pencemaran atau menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan pengawasan.

Peran pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan sampah juga dapat dilihat melalui penyediaan pelayanan pengangkutan, fasilitas pengelolaan, dan kegiatan pemanfaatan sampah. Ketersediaan fasilitas menjadi unsur penting karena kebijakan pengelolaan sampah membutuhkan dukungan sarana yang memadai agar dapat dilaksanakan. Akan tetapi, keberadaan fasilitas perlu

[83] Desa Kertosari, Kec. Pakusari, “foto sungai tercemar,” 31 Agustus 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diikuti dengan pengoperasian dan pemeliharaan yang baik serta kemampuan pengolahan yang sesuai dengan jumlah sampah yang ditangani.



Gambar. 4.9
Foto wilayah pelayanan TPA se-Jember [84]

Dalam penelitian ini, keberadaan TPA Pakusari menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki fasilitas yang berfungsi dalam sistem pengelolaan sampah Kabupaten Jember. Di lokasi tersebut terdapat kegiatan pemilahan sampah oleh pemulung serta upaya pengolahan sampah organik menjadi kompos dan pakan maggot. Kegiatan tersebut memperlihatkan adanya upaya pemanfaatan sampah, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.

Dokumen perencanaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, apabila memuat program dan indikator pengelolaan sampah yang relevan, dapat digunakan untuk membandingkan arah kebijakan dengan kondisi pelaksanaannya. Dokumen tersebut perlu dibaca secara cermat agar dapat dibedakan antara target yang direncanakan dan capaian yang benar-benar telah

[84] DLH Jember, "Peta Pelayanan TPA Se-Jember," 15 Juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

direalisasikan. Dengan demikian, keberadaan program dalam dokumen perencanaan tidak langsung dianggap sebagai bukti bahwa program tersebut telah terlaksana secara optimal.

Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sarana/Indikator Sasaran	**% capaian**	**Predikat Kinerja**				
		Sangat Tinngi	**Tinggi**	**Sedang**	**Rendah**	**Sangat rendah**
Sasaran 3 Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota						
Indikator 1.1 Persentase Sampah yang tertangani	51,93%	-	-	-	~	-
Indikator Persentase Pengendalian Limbah B3	100%	~	-	-	-	-
Rata-rata capaian	**75,96%**					

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tingkat pencapaian indikator persentase sampah yang berhasil ditangani masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 51,93%. Angka tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yaitu sebesar 85%.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, peran pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan sampah di Kabupaten Jember perlu dinilai melalui keterkaitan antara dasar hukum, pelaksanaan program, kondisi fasilitas, pembinaan masyarakat, dan dampak lingkungan yang ditemukan di lapangan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara memberikan informasi mengenai pengalaman dan pandangan narasumber, observasi menunjukkan kondisi yang dilihat secara langsung, dokumentasi foto memperkuat bukti visual, sedangkan dokumen tertulis menjadi dasar untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan dan perencanaan yang berlaku.

Persoalan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan tersedianya tempat pemrosesan akhir, tetapi juga dengan pelaksanaan pembinaan masyarakat, penanganan dampak lingkungan, dan keberlanjutan sarana pengelolaan. Penilaian terhadap peran pemerintah daerah perlu didasarkan pada kesesuaian antara kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 dan bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan sementara dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi mengindikasikan bahwa hambatan utama implementasi perda terletak pada keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Hambatan ini berdampak pada ketidakmampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan perda secara menyeluruh, sehingga efektivitas kebijakan menjadi terbatas.

C. Pembahasan Temuan

Bagian ini penulis menguraikan hasil penelitian dengan menghubungkan pada teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, serta menekankan adanya perubahan fokus penelitian yang muncul berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis. Pembahasan dilakukan secara menyeluruh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agar mampu memberikan gambaran komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

1. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sampah perlu dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah. Pelaksanaan tersebut tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya kebijakan, program, dan fasilitas, tetapi juga perlu dinilai dari hasil yang dicapai serta manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implementasi kewenangan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 dengan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara normatif, Pasal 6 menjadi dasar untuk mengkaji kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 mengarahkan pengelolaan sampah pada tujuan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.[85] Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah menjalankan sejumlah kegiatan yang mendukung pengelolaan dan

[85] Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 6.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemanfaatan sampah. Hal tersebut terlihat dari penyusunan program melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, pengembangan TPS3R dan bank sampah, pelayanan pengangkutan, serta kegiatan pengomposan dan budidaya maggot di TPA Pakusari. Berdasarkan wawancara dengan Yanto Ankira selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Perda menjadi dasar pelaksanaan program pengelolaan sampah, termasuk pengembangan TPS3R dan pembinaan bank sampah.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pengurangan dan pemanfaatan sampah. Penelitian mencatat bahwa sampah yang masuk ke TPA Pakusari mencapai sekitar 190 ton per hari, sedangkan jumlah yang dapat dimanfaatkan kembali masih kurang dari lima persen atau tidak lebih dari sekitar 10 ton per hari berdasarkan keterangan pengelola. Selain itu, ditemukan keterbatasan alat berat, keterbatasan lahan, serta sampah rumah tangga yang masih dibuang dalam keadaan tercampur. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pemanfaatan sampah memang telah berjalan, tetapi kapasitasnya masih terbatas dibandingkan dengan volume sampah yang ditangani.

Jika dianalisis menggunakan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, khususnya konsep Mandat, pelaksanaan tugas pemerintahan harus dilihat berdasarkan hubungan pemberi dan penerima mandat, ruang lingkup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kewenangan yang dijalankan, serta pertanggungjawabannya.[86] Dalam konteks penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menjalankan fungsi perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah, sedangkan UPT TPA Pakusari melaksanakan kegiatan teknis sesuai tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya kegiatan pengangkutan, pemilahan, pengomposan, dan budidaya maggot. Namun, keterbatasan fasilitas, kerusakan alat berat, dan terbatasnya lahan menyebabkan pemanfaatan sampah belum berjalan optimal.

Dari sudut pandang tersebut, Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan tugas teknis perlu didukung oleh koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Meskipun demikian, hubungan antara Dinas Lingkungan Hidup dan UPT TPA Pakusari harus dinyatakan sebagai mandat hanya apabila terdapat dasar hukum yang menunjukkan pemberian mandat tersebut. Oleh karena itu, konsep mandat dalam pembahasan ini digunakan untuk menguji pelaksanaan kewenangan, bukan untuk menganggap bahwa setiap pembagian tugas secara otomatis merupakan mandat.[87]

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah Syar'iyyah, pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dinilai berdasarkan orientasinya pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bil-maslahah, yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada

[86] Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, (No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997), hal.1

[87] Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang* (Surabaya: Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair, 1997), 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemaslahatan.[88] Selain itu, QS. Al-A'raf ayat 56 melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi setelah bumi diperbaiki. Kaidah fikih adh-dhararu yuzal, yang berarti kemudaratan harus dihilangkan, juga memberikan landasan normatif bagi pentingnya penanganan sampah yang melindungi kesehatan dan lingkungan.[89]

Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian, kegiatan pengangkutan, pengomposan, budidaya maggot, dan pemilahan sampah merupakan upaya yang dapat mendukung kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, penumpukan sampah, bau yang mengganggu warga, serta terbatasnya pemanfaatan menunjukkan bahwa manfaat kebijakan tersebut belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan perlu diarahkan bukan hanya pada terselenggaranya kegiatan administratif dan teknis, tetapi juga pada pengurangan kemudaratan serta peningkatan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan pembahasan tersebut, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pemanfaatan sampah telah terlihat melalui perencanaan, pelayanan pengangkutan, dan pelaksanaan beberapa kegiatan pengolahan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif Perda dan kondisi empiris. Peningkatan kapasitas pengolahan, pemeliharaan sarana, pembinaan masyarakat, dan

[88] Al Nafiz1, Indra Ezha, Noor Rizhal, Herlina, Maulina,"*Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum*," no. 2 (Mei 2025): 141, https://ibnusinapublisher.org/index.php/AL-MUSTAQBAL/article/download/155/148/911

[89] "TafsirWeb," Tafsir Surat Al- A'raf, September, 2018, https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengawasan menjadi bagian penting untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan tersebut.

kewenangan sudah dijalankan, tetapi hasil pemanfaatan sampah belum optimal. Teori mandat digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pertanggungjawaban kewenangan, sedangkan teori siyasah digunakan untuk menilai apakah pelaksanaannya sudah mengarah pada kemaslahatan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Pemanfaatan Sampah.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sampah dipengaruhi oleh faktor yang mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan, sedangkan faktor penghambat dapat membatasi pencapaian tujuan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut perlu dianalisis secara berimbang agar dapat diketahui bukan hanya kendala yang ditemukan, tetapi juga sumber daya dan potensi yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki pelaksanaan Perda.

Secara normatif, Pasal 5 dan Pasal 6 Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 menjadi dasar untuk menilai tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas, pengembangan upaya pengurangan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penanganan, serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan rumusan pasal yang berlaku. Sementara itu, Pasal 12 menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Dengan demikian, faktor penghambat dan pendukung perlu dihubungkan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu aturan hukum.[90] Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023. Analisis dilakukan dengan melihat keberadaan dasar hukum, pelaksanaan tugas oleh instansi terkait, ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), 80

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.2
Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Berdasarkan Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah

No	Faktor Efektivitas Hukum	Faktor Pendukung	Faktor penghambat
1.	Faktor hukum (norma hukum)	Adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pengelolaan sampah. Pasal 4 mengatur tujuan pengelolaan sampah, Pasal 5 mengatur tugas Pemerintah Daerah, Pasal 6 mengatur kewenangannya, dan Pasal 12 berkaitan dengan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.	Berdasarkan temuan penelitian, hambatan utamanya bukan ketiadaan peraturan, melainkan pelaksanaan ketentuan yang belum optimal. Adanya Perda belum dengan sendirinya menjamin pengurangan dan pemanfaatan sampah berjalan maksimal.
2.	Faktor penegak hukum	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan sampah, sedangkan UPT TPA Pakusari menangani kegiatan operasional. Pembagian pelaksanaan tugas tersebut menjadi unsur pendukung dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.	Pelaksanaan tugas pemerintah daerah menghadapi keterbatasan lahan TPA, penumpukan sampah, serta belum memadainya fasilitas pengolahan. TPA Pakusari menjadi tumpuan utama pengelolaan sampah, sedangkan layanan TPS3R belum menjangkau seluruh kecamatan secara optimal.
3.	Faktor sarana atau fasilitas	Tersedianya TPA Pakusari sebagai tempat pemrosesan akhir, TPS dan TPS3R	Keterbatasan lahan menyebabkan kapasitas TPA semakin terbebani. Penggunaan metode open

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Faktor Efektivitas Hukum	Faktor Pendukung	Faktor penghambat
		sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah, serta kegiatan pengolahan seperti pengomposan dan budidaya maggot. Sarana tersebut menjadi modal awal untuk mendukung penanganan dan pemanfaatan sampah.	dumping menyebabkan sampah menumpuk dan kondisi TPA menjadi overload. Selain itu, terdapat alat berat yang rusak atau tidak berfungsi optimal sehingga menghambat pemindahan, penataan, dan pengolahan sampah. TPS3R juga belum tersedia atau beroperasi optimal secara merata di seluruh kecamatan.
4.	Faktor masyarakat	Adanya kegiatan bank sampah dan pemilahan sampah yang dapat menjadi sarana keterlibatan masyarakat dalam mengurangi sampah. Program pembinaan dan penyuluhan juga dapat mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Partisipasi masyarakat belum merata. Pemilahan sampah dari rumah tangga dan pemanfaatan bank sampah belum berjalan optimal di seluruh wilayah. Kondisi ini menyebabkan sampah yang masuk ke tempat penampungan dan TPA masih berpotensi tercampur sehingga menyulitkan proses pengolahan dan pemanfaatan.
5.	Faktor kebudayaan	Belum ditemukan faktor pendukung kebudayaan yang kuat dan merata berdasarkan temuan penelitian. Kebiasaan memilah sampah, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah dapat menjadi faktor pendukung apabila telah menjadi kebiasaan masyarakat.	Masih terdapat kebiasaan menangani sampah dengan cara dibakar atau ditimbun serta belum terbentuknya kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Kebiasaan tersebut dapat menghambat penerapan pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan dan pemanfaatan kembali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah saling berkaitan. Dasar hukum, perencanaan, struktur pelaksana, dan kegiatan pemanfaatan merupakan modal yang telah tersedia. Namun, efektivitasnya dibatasi oleh keterbatasan fasilitas, kapasitas operasional, pembinaan masyarakat, dan pemerataan pelayanan. Upaya perbaikan perlu diarahkan untuk mengembangkan faktor pendukung sekaligus mengatasi hambatan yang ditemukan berdasarkan data penelitian.

3. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Permasalahan Sampah Terkait Tugas Dan Wewenangnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah.

Fungsi Pemerintah Daerah dalam menghadapi permasalahan sampah mencakup penyusunan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan, penyediaan dan pengembangan fasilitas, pembinaan masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Peran tersebut diperlukan karena permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan banyaknya sampah yang dihasilkan, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah, menangani sampah yang telah terkumpul, memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai guna, dan menjaga kualitas lingkungan.

Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menghadapi permasalahan sampah perlu dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.[91] Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh pelaksanaan tugas pemerintah, ketersediaan fasilitas, keterlibatan masyarakat, dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, penyediaan fasilitas, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Ditinjau dari faktor hukum, Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum untuk mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga pada pengurangan serta pemanfaatan sampah. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, serta Pasal 12 yang mengatur pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Oleh karena itu, fungsi Pemerintah Daerah perlu diwujudkan melalui kebijakan dan program yang mampu menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Ditinjau dari faktor penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan

[91] Agus Riyanto. "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?," *Rubric Of Faculty Members* (Blog). Desember, 2018, https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelolaan sampah melalui pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi.[92] Pelaksanaan fungsi tersebut perlu diperkuat dengan kerja sama bersama pemerintah desa atau kelurahan serta masyarakat. Kerja sama tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan, program pemilahan sampah rumah tangga, penguatan bank sampah, serta pengembangan kegiatan pengurangan dan pemanfaatan sampah. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penyelenggara layanan, tetapi juga sebagai pengarah dan fasilitator dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai pihak.

Selanjutnya, dari faktor sarana atau fasilitas, fungsi Pemerintah Daerah perlu diwujudkan melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana pengelolaan sampah yang memadai. Keterbatasan lahan, kondisi peralatan operasional di TPA Pakusari, serta belum meratanya fasilitas pengolahan sampah dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menangani sampah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya perbaikan fasilitas, penguatan TPS3R dan bank sampah, serta penyediaan sarana yang mendukung pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Penyediaan fasilitas tersebut penting agar pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada proses pengangkutan menuju TPA, tetapi juga mengutamakan pengurangan volume sampah yang harus dibuang.

Dari faktor masyarakat, fungsi Pemerintah Daerah perlu diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertanggung jawab.[93] Masyarakat perlu memperoleh pemahaman dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pemilahan, penggunaan bank sampah, pendaurulangan, serta pengolahan sampah organik. Dalam hal ini, pemerintah perlu membangun komunikasi yang berkelanjutan, menyediakan informasi mengenai layanan persampahan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan maupun evaluasi program. Partisipasi tersebut menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat dicapai hanya melalui tindakan pemerintah tanpa adanya keterlibatan warga sebagai penghasil sampah.

Sementara itu, dari faktor kebudayaan, permasalahan sampah juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang masih membakar atau menimbun sampah.[94] Kebiasaan tersebut perlu diubah melalui edukasi yang berkelanjutan dan penyediaan alternatif pengelolaan sampah yang mudah dijangkau. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah pemilahan sampah rumah tangga sebelum dibawa ke tempat penampungan sementara (TPS). Sampah organik dapat diarahkan untuk diolah menjadi kompos atau melalui metode lain yang sesuai, sedangkan sampah anorganik yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali atau disalurkan melalui bank sampah dan kegiatan daur ulang. Adapun sampah residu perlu ditangani melalui sistem pengangkutan dan pemrosesan yang sesuai. Dengan demikian, perubahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

[94] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perilaku masyarakat perlu berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas dan pembinaan dari pemerintah.

Sementara itu *Konsep Good Environmental Governance* fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menghadapi permasalahan sampah dapat dilihat melalui prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.[95] Dari aspek partisipasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah rumah tangga masih perlu ditingkatkan, terutama karena masyarakat yang diwawancarai menyatakan belum memperoleh penyuluhan atau pelatihan terkait pemilahan sampah. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup perlu memperkuat edukasi dan pendampingan masyarakat. Dari aspek transparansi, pemerintah perlu menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan fasilitas pengelolaan sampah secara jelas agar masyarakat memahami cara berpartisipasi.[96] Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program dan menindaklanjuti kendala yang ditemukan, seperti keterbatasan fasilitas dan rendahnya pemanfaatan sampah di TPA Pakusari.

Selanjutnya, prinsip koordinasi dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah.[97]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Muh Syainal Nur, Achmad Husen," Penerapan Good Environmental Governance dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* no. 1 (1 Januari 2022)

[96] Atalyan Wian. "Good Environmental Governance: Prinsip, Manfaat, dan Penerapan," *mekari.com* (blog). Januari 23, 2024, https://mekari.com/blog/good-environmental-governance-adalah/

[97] Fairuz Marsya," Good Environmental Governance untuk Smart City Berkelanjutan, Agustus 4, 2026, https://www.caliana.id/blog/good-environmental-governance-untuk-smart-city-berkelanjutan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Koordinasi perlu diperkuat antara Dinas Lingkungan Hidup, UPT TPA Pakusari, pemerintah desa atau kelurahan, pengelola TPS3R, bank sampah, dan masyarakat agar pengelolaan sampah berjalan terpadu dari sumber hingga TPA.

Adapun prinsip keberlanjutan lingkungan menuntut adanya perubahan pola pengelolaan sampah, tidak hanya melalui pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga melalui pemilahan sampah rumah tangga, pengomposan, dan pendaurulangan. Kebiasaan membakar atau menimbun sampah perlu diarahkan menuju cara pengelolaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan perspektif *Good Environmental Governance*, fungsi Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan melalui pembinaan masyarakat, penyediaan fasilitas, pengawasan, dan koordinasi agar pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan uraian tersebut, fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menghadapi permasalahan sampah tidak hanya terletak pada pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah, tetapi juga pada upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut, sedangkan perspektif *Good Environmental Governance* menjadi dasar untuk menilai arah tata kelola lingkungan yang perlu diperkuat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pelaksanaan peraturan,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan pembinaan dan pengawasan, serta membangun partisipasi dan kebiasaan masyarakat dalam memilah dan memanfaatkan sampah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan sampah di Kabupaten Jember yang lebih efektif sekaligus mendukung perlindungan dan keberlanjutan lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sampah, bisa disimpulkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pemanfaatan sampah telah dilaksanakan melalui pelayanan pengangkutan, pengembangan fasilitas pengelolaan sampah, serta kegiatan pemanfaatan sampah di TPA Pakusari, seperti pengolahan sampah organik menjadi kompos dan pakan maggot. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena sebagian besar kegiatan masih berfokus pada pengumpulan dan pengangkutan. Kemampuan pemanfaatan sampah juga masih terbatas dibandingkan dengan volume sampah yang masuk, sementara pemilahan sampah dari rumah tangga belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah telah berlangsung, tetapi belum mampu mengurangi timbunan sampah secara maksimal.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Jember telah didukung oleh adanya dasar hukum, keberadaan TPA Pakusari, petugas pengelola, serta program dan fasilitas pengelolaan sampah. Di sisi lain, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sarana dan prasarana, kapasitas pengolahan, meningkatnya volume sampah, serta kurangnya sosialisasi dan kesadaran sebagian masyarakat dalam memilah sampah. Selain itu, pembinaan masyarakat dan pemerataan pelayanan masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga pada dukungan fasilitas dan keterlibatan masyarakat.

3. Fungsi pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan sampah telah diwujudkan melalui penyusunan program, pelayanan pengangkutan, pengelolaan di TPA Pakusari, serta upaya pengembangan pemanfaatan sampah. Meskipun demikian, fungsi tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan pengolahan dan pemanfaatan sampah, pembinaan masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan dan masyarakat agar pemilahan dapat dilakukan sejak dari sumbernya. Dengan demikian, peran pemerintah daerah perlu diarahkan tidak hanya untuk menangani sampah yang telah terkumpul, tetapi juga untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan pemanfaatannya secara berkelanjutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya dalam menjalankan tugas dan wewenang serta meningkatkan pemanfaatan sampah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, diharapkan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan serta pemanfaatan sampah sejak dari sumbernya, sekaligus mengoptimalkan pengolahan sampah di TPA Pakusari.
3. Bagi masyarakat Kabupaten Jember, diharapkan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sampah melalui kebiasaan memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, serta mengurangi timbulan sampah demi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustino, *Dasar-Dasar Evaluasi Kebijakan Publik.* (Bandung: Alfabeta, 2020).

Cadbury Committeem of UK. *The Financial Aspects of Corporate Governance*. (London: Gee publising, 1992),

Dzajuli, A *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

E, Sadjijono. *Good Governance: Konsep dan Implementasi Dalam Pemerintahan*. (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2007),

Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A social Science Perspective*, Terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Med, 2019).

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*: *Introductions to the Indonesia Administrative Law,* (Yogyakarta: UGM press, 2008).

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law,* Terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media)

M.B, Miles. Huberman, A.M., Saldana, J, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014).

Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004).

M. Hadjon, Phillipus, *Tentang Wewenang*, Yuridika, (No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997), hal.1

M. Hadjon, Phillipus, *Tentang Wewenang* (Surabaya: Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair, 1997), 20

Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tengara Barat: Mataram University Press, 2020).

Salim, Peter. dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* (Jakarta: Modern English Press, 2002).

Soekanto, Soerjono *PengantarPeneliitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Soekanto, Soerjono, *"Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum"* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal. 115

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 9

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

Sudirman, *Pengelolaan Sampah: Pendekatan Sistematik Dan Partisipatif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Syarif, Amiroedin. *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Bina aksara, 1987).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen,2019), h. 6

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*. (Malang: Bayumedia Press, 2010)

World Bank, *Governance and Development*. (Washington, D.C,: The World Bank, 1992).

JURNAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tamam, Badrut. Sabrina, Hilda Nur. Putra, Yudha Bagus Tunggala. "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, no. 1 (2024): 100-101.

Puasa, Rafly Rilandi. Lumosos, Johny. Kumayas, Neni. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018).

Pelenkahu, Micel George. Gosal, Ronny. Sambiran, Sarah. "Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan,* no. 2 (2017).

Fajariyadi, Gusti Ngurah Hendra. "implementasi peraturan daerah kabupaten jember no 2 th 2023 tentang pengelolaan sampah," *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, no. 1 (juni 2024).

Rima Fadhilatunnisa, Ahmad Rama, Antonia Alda Resalda, Muhammad Sulthon, Robani Thai'ib, Rima Yuni Saputri, Dian Permata Sari, relevansi faktor penegakan hukum Menurut soerjono soekanto dalam Menghadapi fenomena cyber crime,"*Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, no. 1 April 2017 https://sihojurnal.com/index.php/pakehum/article/download/1432/1202

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Muh. Syainal Nur, Achmad Husen,"Good Environmental Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, no. 11 (1 januari 2022): 38-39, https://media.neliti.com/media/publications/457617-none-6bede289.

Muh Syainal Nur, Achmad Husen," Penerapan Good Environmental Governance dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* no. 1 (1 Januari 2022)

Al Nafiz1, Indra Ezha, Noor Rizhal, Herlina, Maulina,"*Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum*," no. 2 (Mei 2025): 141, https://ibnusinapublisher.org/index.php/AL-MUSTAQBAL/article/download/155/148/911

SKRIPSI

Andreansyah, Arung. "Implikasi Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan (Di Pengadilan Agama Banyuwangi)" (Skripsi UIN Khas Jember, 2025),

Suryo, Saebu Tri. "Pengelolaan Sampah Oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru (Studi di kecamatan rumbai pesisir)," (Skripsi, Universitas Riau, 2021).

Fitriani, "Peran Pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah perkotaan di kabupaten maros," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah makasar, 2023).

Rahman, Abdur. "Strategi Pengelolaan sampah di pasar kebon reok Ampenan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022/2023).

INTERNET

Lama, Nuru."Dunia Punya Masalah Sampah," *Global IFC* (blog). April 26, 2024, https://www.ifc.org/en/blogs/2024/the-world-has-a-waste-problem

"Humas BRIN," 11,3 Juta Ton Sampah Di Indonesia Tidak Terkelola Dengan Baik, Google, BRIN Juli 26 2024 , https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik

"Radar Digital: overload,"TPA pakusari jember terima 200 ton per hari, ketinggian gunungan sampah mencapai 25 meter," 9 november 2023, https://radarjember.jawapos.com/jember/793263555/overload-tpa-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pakusari-jember-terima-200-ton-per-hariketinggian-gunungan-sampah-capai-25-meter

”Warga Jember Hasilkan Ribuan Ton Sampah Per Hari Tapi Tak Bisa Kelola, ini akibatnya, *Merdeka.com,* Desember 15, 2022, https://www.merdeka.com/jatim/warga-jember-hasilkan-ribuan-ton-sampah-per-hari-tapi-tak-bisa-kelola-ini-akibatnya.html?page=3

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember,”Selayang Pandang,” *Pemerintahan Kabupaten Jember.* https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/

Edwards III, George C, *implementing public policy.*(Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), https://books.google.com/books/about/Implementing_Public_Policy.html?hl=id&id=nQtHAAAAMAAJ&source=sh%2Fx%2Fsrp%2Fwr%2Fm1%2F4&kgs=0a50b9a2000fac78

Edy, Sarwo. “darurat sampah di indonesia” 30 januari 2025, https://www.g-news.id/opini/158915422/darurat-sampah-di-indonesia-tantangan-dan-solusi-menuju-pengelolaan-yang-berkelanjutan

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/21120/20831

Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* (Lhokseumawe, Unimal Press, 2019), 73-74, https://stianasional.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Pengantar-Ilmu-Adm-Negara.

Tim Hukumonline,”Peraturan daerah: fungsi, muatan, dan aspek pentingnya,” *Hukumonline.com.* 12 juni 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/

UNEP, “ Guidelines for National Waste Management Strategies: Moving from Challenges to Opportunities. 2014:https://www.unep.org/resources/report/guidelines-national-waste-management-strategies-moving-challenges-opportunities.

Yusuf, M. Aris Yusuf. “15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli,” *Gramedia* (Blog), Oktober 11, 2021. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/?srsltid=AfmBOop48fXKLfOk77NbWsC1y0k3YxJzyuwOEVFiD9OWH4tyV9ZQPxeb

“TafsirWeb,” Tafsir Surat Al- A’raf, September, 2018, https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BLOG

"Wewenang" 17 Oktober 2014, https://paralegal.id/pengertian/wewenang/

Atalya Wian."Good Environmental Governance: Prinsip, Manfaat, dan Penerapan," *Mekari* (blog). Januari 23, 2024, https://mekari.com/blog/good-environmental-governance

Agus Riyanto. "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?," *Rubric Of Faculty Members* (Blog). Desember, 2018, https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/

Atalyan Wian. "Good Environmental Governance: Prinsip, Manfaat, dan Penerapan," *mekari.com* (blog). Januari 23, 2024, https://mekari.com/blog/good-environmental-governance-adalah/

Fairuz Marsya," Good Environmental Governance untuk Smart City Berkelanjutan, Agustus 4, 2026, https://www.caliana.id/blog/good-environmental-governance-untuk-smart-city-berkelanjutan

TERJEMAH AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Tajwid dan Terjemah, Denpasar: Qur'an Tajuwid, 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember.

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Jember.

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 9 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember.

WAWANCARA

Yanto Ankira, Kepala Bidang Kebersihan Sampah dan Pengelolaan Sampah diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2025.

Akhmad Baisofi, Kepala Bidang Administrasi TPA Pakusari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 1 Juli 2025.

Ardiansyah, Masyarakat Sekitar TPA Pakusari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 31 Agustus 2025.

Slamet, Masyarakat Desa Ketosari, Kecamatan Pakusari, diwawancarai oleh Penulis, Jember 31 Agustus 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KEPENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Moch Chikhal Firdaus
Nim	: 212102030030
Prodi/Jurusan	: Hukum Tata Negara/Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian yang saya susun ini sepenuhnya merupakan karya asli saya sendiri. Dalam penyusunan penelitian ini, tidak terdapat bagian atau unsur yang merupakan hasil penjiplakan dari karya ilmiah maupun penelitian orang lain, kecuali apabila secara tertulis telah dicantumkan sebagai kutipan serta tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penelitian ini mengandung unsur plagiarisme atau terdapat klaim dari pihak lain atas sebagian atau seluruh isi penelitian ini, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

Jember, 22 Oktober 2026
Saya yang menyatakan,



Moch Chikhal Firdaus
NIM 212102030030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2

MATRIK PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metpen
Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan	1. Bagaimana implementasi perda nomor 2 tahun 2023 dalam pemanfaatan sampah di TPA Pakusari, jember ?	1. Impelementasi Perda No. 2 Tahun 2023	1. Pemanfaatan sampah sesuai amanat Perda	Penerapan pemilahan di sumbernya, penerapan metode sanitary landfill/ pengolahan 3R, optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya (energi/ekonomi)	1. Data Primer: Wawancara DLH Jember Wawancara pengelola TPA Pakusari Observasi TPA Pakusari 2. Data	1. Jenis penelitian: Hukum empiris 2. Pendekatan: Sosiologis Hukum & Perundang-undangan Teknik 3. Pengumpulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sampah Di Tpa Pakusari, Jember)	2. Bagaimana tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam mengelola dan pemanfaatan sampah berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2023?	1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan kewenangan sesuai Perda	Penyediaan sarana prasarana TPA, Pengawasan dan penegakan hukum, Edukasi dan pelibatan masyarakat	Sekunder: Melalui buku, jurnal, Dokumen Perda No.2/2023 Renstra DLH Data SIPSN KLHK	Data: Wawancara, Observasi, Dokumentasi 4. Teknik Analisis: Deskriptif Kualitatif 5. Keabsahan Data: Triangulasi sumber & Triangulasi teknik
	3. Hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2023 serta solusinya?	1. Hambatan Implementasi	1. Faktor penghambat	Mengacu teori implementasi Edward III: 1. Komunikasi kebijakan 2. Sumber daya (SDM/. Anggaran/Peralatan) 3. Disposisi pelaksana 4. Struktur birokrasi + Faktor partisipasi masyarakat		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 **Surat Izin Penelitian**

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/1711/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar	: 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
Memperhatikan	: Surat Universitas Islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember , 19 Mei 2025, Nomor: B-1881/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/ 2025, Perihal: Permohonan izin penelitian lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama	: Moch Chikhal Firdaus
NIM	: 212102030030
Daftar Tim	: -
Instansi	: UIN KHAS Jember/ Syariah/ Hukum tata negara
Alamat	: JL. Mataram No.1 Mangli, Jember
Keperluan	: Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Implementasi perda nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah (studi tugas dan wewenang pemerintahan daerah dalam pemanfaatan sampah di TPA Pakusari, Jember)
Lokasi	: Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan, Jember TPA Pakusari, Jember
Waktu Kegiatan	: 26 Mei 2025 s/d 26 Juni 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 21 Mei 2025
SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik
j-krep.jemberkab.go.id

DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I
NIP. 19811220 200012 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 4

PEDOMAN PENELITIAN

A. Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

1. Bagaimana gambaran umum implementasi Perda No. 2 Tahun 2023 terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah di Kabupaten Jember?
2. Apa langkah strategis yang telah dilakukan DLH untuk memanfaatkan sampah di TPA Pakusari sesuai ketentuan perda?
3. Berdasarkan perda, apa saja tugas dan wewenang DLH dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah?
4. Apakah metode sanitary landfill sudah diterapkan di TPA Pakusari? Jika belum, apa kendalanya?
5. Bagaimana koordinasi DLH dengan pihak lain (swasta, komunitas, atau instansi lain) dalam pemanfaatan sampah?
6. Bagaimana DLH melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda di lapangan?
7. Apakah ada program edukasi atau pelatihan kepada masyarakat terkait pemilahan dan pemanfaatan sampah?
8. Bagaimana rencana jangka panjang DLH untuk mengatasi kapasitas TPA yang sudah overload?
9. Apa solusi yang sedang atau akan diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut?

B. Wawancara untuk Pengelola TPA Pakusari

1. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2023 di TPA Pakusari?
2. Berapa rata-rata volume sampah yang masuk ke TPA setiap hari, dan berapa kapasitas ideal TPA?
3. Bagaimana proses pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan di TPA?
4. Apakah sudah ada teknologi atau metode khusus untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat?
5. Bagaimana keterlibatan pihak ketiga atau masyarakat dalam pemanfaatan sampah di TPA?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pemanfaatan sampah di TPA Pakusari?
7. Bagaimana dampak kelebihan kapasitas sampah terhadap lingkungan sekitar?
8. Solusi atau inovasi apa yang menurut Anda paling efektif untuk mengurangi beban TPA?

C. Wawancara dengan masyarakat sekitar TPA Pakusari

1. Apakah Anda mengetahui adanya Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Menurut Anda, apakah setelah adanya perda tersebut ada perubahan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini?
3. Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah terkait pemilahan dan pemanfaatan sampah?
4. Bagaimana dampak keberadaan TPA Pakusari terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat?
5. Apakah Anda bersedia terlibat dalam program pemilahan atau pemanfaatan sampah?
6. Menurut Anda, apa hambatan terbesar dalam mengelola sampah di tingkat masyarakat?
7. Harapan Anda kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah di TPA Pakusari?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 5

BUPATI JEMBER

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 6

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi TPA Pakusari
Bapak Akhmad Baisofi



Wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Sampah dan
Pengelolaan Sampah bapak Yanto Ankira



Mengikuti Pertemuan Sekaligus Observasi Di TPS3R Bersama DLH
Dan Koordinator TPS3R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Observasi Kondisi TPA Pakusari



Dokumentasi Tempat Pemanfaatan Sampah Limbah Organik/ Budidaya Maggot



Dokumentasi Tempat Limbah Anorganik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Nama	: Moch Chikhal Firdaus
NIM	: 212102030030
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Tempat Tanggal Lahir	: Jember, 11 Oktober 2002
Alamat	: Dusun Jatikoong, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
Email	: mochchikhalfirdaus@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 02 Jatiroto	(2008-2015)
SMPN 02 Jatiroto	(2015-2018)
SMAN 1 Jatiroto	(2018-2021)
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2021-2026)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id